

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membimbing kita untuk menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan media informasi dan pola pengukuran akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang menggambarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi guna mewujudkan visi organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Panduan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja. Keberhasilan kinerja organisasi diukur berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai perspektif.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memenuhi harapan Pimpinan Instansi dan hasilnya lebih baik dari kinerja sebelumnya dan sebagai pendorong untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, 30 Desember 2025

Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga



Dr. Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif (<i>Executive Summary</i>)	iv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
I.3. Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur	3
I.4. Isu Strategis	5
I.5. Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Rencana Strategis 2025-2029 dan Pohon Kinerja	10
II.2 Rencana Kerja	11
II.3 Indikator Kinerja Utama	12
II.4 Perjanjian Kinerja	13
II.5 Postur Anggaran	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Pengukuran Kinerja	18
III.2 Capaian Kinerja	20
III.3 Realisasi Anggaran	42
III.4 Capaian Prioritas Nasional	42
III.5 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP 2024	44
III.6 <i>Success Story</i>	46
BAB IV PENUTUP	
IV.1 Kesimpulan	52
IV.2 Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan	52

IKHTISAR EKSEKUTIF (*Executive Summary*)

Dalam mewujudkan tertib administrasi, setiap unit kerja sudah sepatutnya membuat Laporan Kinerja (LKj) untuk mengukur capaian kinerja dalam satu tahun. Laporan kinerja merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan dengan biaya berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) juga diharapkan dapat menentukan besaran kinerja dalam satuan jumlah atau persentase, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan tahun berikutnya.

Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025. Dari kedua dokumen tersebut serta visi Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu:

"Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menjadi acuan dalam program pembangunan olahraga tidak hanya peningkatan prestasi olahraga Indonesia, namun yang lebih penting adalah bagaimana olahraga dapat menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, bugar dan aktif di masa mendatang. Indonesia pada tahun 2045 menargetkan memiliki generasi emas yang mampu membawa kebangkitan dan kemajuan negara serta menciptakan peradaban yang unggul dari bangsa-bangsa lain di dunia. Generasi emas tidak akan tercipta dengan kondisi fisik dan mental sumber daya manusia (SDM) yang lemah, disinilah peran dunia olahraga sangat penting dalam menyiapkan SDM unggul yang memiliki tingkat kebugaran tinggi dan karakter yang kuat.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Pembudayaan Olahraga Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang dirincikan pada tabel berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga	1.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir	36,71%
		1.2	Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat	0,23
		1.3	Persentase Provinsi yang Menyelenggarakan Kampanye Olahraga	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan professional	2.1	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	76,5
		2.2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	83,5
		2.3	Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	3
		2.4	Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80
		2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	89.2
		2.6	Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	76.5
		2.7	Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	81%
		2.8	Persentase Temuan LHP BPK	82%
		2.9	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75%

Dari sasaran yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa Deputi Pembudayaan Olahraga mempunyai 12 capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dihitung secara umum tercapai 107,61% atau berkategori **Sangat Baik**.

Terdapat 1 indikator kinerja utama yang belum tercapai yaitu Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir. Dalam capaian realisasi anggaran, dari pagu sebesar Rp80.000.000.000. Realisasi daya serap yang telah dilaksanakan serta perhitungan internal Deputi Pembudayaan Olahraga sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp79.381.940.532 (99,23%).

Jakarta, 30 Desember 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu cara yang dipilih untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Hal tersebut bisa dicapai apabila pembangunan dan pengelolaan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan keolahragaan diarahkan agar tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Dengan demikian, perlu upaya pelayanan atas pembudayaan olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Terkait dengan pelayanan keolahragaan, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga. Pada tahun 2025, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki sasaran program berupa meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan terwujudnya Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional, dan melayani. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yaitu persentase penduduk usia 10 Tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat Indonesia. Dalam menerapkan Indikator kinerja utama, tugas dan fungsi di *cascading* kepada Asisten Deputy Bidang Olahraga Penyandang Layanan Khusus, Asisten Deputy Bidang Olahraga Pendidikan, Asisten Deputy Bidang Olahraga Masyarakat, dan Asisten Deputy Bidang Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga. Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mewujudkan tugas dan fungsi dari Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional, dan melayani.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan informasi, sekaligus pertanggungjawaban guna menerangkan tingkat keberhasilan kinerja serta tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Penyusunan Laporan Kinerja untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan strategi

unit kerja kedeputian yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan melakukan evaluasi yang cenderung mengarah kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk ditingkatkan kearah yang lebih baik sesuai dengan program dan kebijakan Kementerian yang ditetapkan.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini mengacu pada peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PermenpanRB No. 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja dimaksud memiliki dua fungsi utama. Pertama sebagai sarana bagi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Instansi (LKj) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga;
- f. Pelaksanaan administrasi deputi bidang pembudayaan olahraga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri pemuda dan olahraga

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 5 unit Eselon II yaitu Asisten Deputi Bidang Olahraga Penyandang Layanan Khusus, Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan, Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat, Asisten Deputi Bidang Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga, dan Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga layanan khusus. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Olahraga Penyandang Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang olahraga penyandang Layanan Khusus;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga penyandang Layanan Khusus;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga penyandang Layanan Khusus;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga penyandang Layanan Khusus; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga penyandang Layanan Khusus.

Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang olahraga pendidikan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan.

Asisten Deputi Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Asisten Deputi Olahraga Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang olahraga masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat.

Asisten Deputi Bidang Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Bidang Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga.

Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputy;
- b. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputy;
- c. penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputy;
- d. pengelolaan keuangan Deputy;
- e. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan dan arsip, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Deputy;
- f. penyusunan laporan Deputy; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.



3. Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki SDM yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari. Pegawai pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga berjumlah 110 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Bagian	Jumlah
1	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	29

2	Asisten Deputi Bidang Olahraga Layanan Khusus	20
3	Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan	21
4	Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat	18
5	Asisten Deputi Bidang Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	16
Total		106

4. Potensi Permasalahan

Dimensi Partisipasi dan Kebugaran menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam pada periode awal pengukuran sebelum kembali mengalami perbaikan. Dimensi Partisipasi tercatat menurun dari 0,286 pada tahun 2021 menjadi 0,254 pada tahun 2023, sebelum meningkat kembali menjadi 0,334 pada tahun 2025. Pola yang sama juga terlihat pada dimensi Kebugaran, yang mengalami penurunan dari 0,203 menjadi 0,179 pada tahun 2023, kemudian meningkat secara signifikan hingga mencapai 0,347 pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam mendorong keterlibatan langsung masyarakat untuk berolahraga, khususnya pada fase awal pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga.

Di sisi lain, peningkatan yang terjadi pada periode berikutnya menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pemulihan yang dilaksanakan mulai memberikan dampak positif. Penguatan kegiatan olahraga masyarakat, perluasan jangkauan program, serta meningkatnya sinergi lintas sektor berkontribusi terhadap membaiknya partisipasi olahraga dan tingkat kebugaran masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pembudayaan olahraga perlu terus diarahkan tidak hanya pada pencapaian indikator secara kuantitatif, tetapi juga pada keberlanjutan dan pemerataan manfaat olahraga di seluruh lapisan masyarakat.

Lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga pada tahun 2025 terjadi perubahan pembentukan tim yang tidak lagi berdasarkan tingkat eselon atau struktural melainkan sistem tim kerja yang dikoordinir oleh ketua tim atau fungsional sehingga memerlukan adaptasi. Selain itu, tidak adanya pola kerja *segregation of duties* yang bisa menimbulkan potensi *fraud*. Penempatan SDM pada tim terkadang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga output yang dihasilkan tidak maksimal. Selain itu, dalam hal administrasi keuangan, terdapat perubahan jabatan pengelola keuangan di mana pada tahun anggaran 2025 jabatan tersebut diampu oleh orang di luar bagian unit kerja tertentu sehingga berpotensi menimbulkan GAP informasi dan komunikasi

sehingga rawan terjadi konflik internal antar unit kerja pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, terutama bagian SDM yang bertugas sebagai analis kebijakan dan pengelola keuangan.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan dan kurang optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja

d. Aspek Anggaran

Kebijakan dari pihak luar Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan pendanaan program dan kegiatan yang sangat situasional sehingga satuan kerja harus secara cepat merubah susunan program dan kegiatan atau bahkan menghilangkan suatu program atau kegiatan

Gambaran Aspek Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan Organisasi

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;

- 2) Legitimasi hukum keolahragaan, DBON, dan kebijakan organisasi;
- 3) Sumber daya manusia yang berkualitas;
- 4) Struktur organisasi yang jelas dari pusat;
- 5) Anggaran dan dukungan keuangan yang bersumber dari APBN.

b. Kelemahan Organisasi

- 1) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah;
- 2) Masih menganut paham kebijakan tahun sebelumnya bisa relevan untuk dilaksanakan untuk tahun sekarang;
- 3) Kurangnya evaluasi dan monitoring atas program yang telah dilaksanakan secara berkala;
- 4) Komunikasi internal antar bagian dalam satu kedeputian;
- 5) *Cascading* kinerja yang masih belum runtut dan sesuai dengan sasaran program dan kegiatan Kementerian.

c. Potensi Organisasi

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja;
- 4) Peluang kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

a. Peluang Organisasi

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang DBON yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;

4) Peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat yang bisa dijadikan kesempatan untuk mengkampanyekan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

b. Ancaman Organisasi

- 1) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal yang menyebabkan konflik baik dengan satu bagian internal di UKE II, unit kerja lainnya di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, maupun satker lainnya;
- 2) Adanya kebijakan dari K/L lain yang bersumber dari arahan presiden terkait dengan pelaksanaan kinerja anggaran berupa pemotongan pagu;
- 3) Perubahan sosial budaya di zaman modern yang cepat.

5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum terkait latar belakang, dasar hukum, tugas dan wewenang, struktur organisasi, kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, serta sistematika penyajian laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan visi misi dan rencana kerja serta anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga beserta pencapaian realisasi anggarannya dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

4. BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2025 beserta rekomendasinya untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Deputy Pembudayaan Olahraga telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah ditandatangani di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga. Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dalam perencanaan kinerja harus ada komponen-komponen untuk mendukung capaian kinerja, yaitu melalui:

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

3. Kegiatan

kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

1. Rencana Strategis Kemenpora dan Pohon Kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Sasaran strategis utama pembudayaan olahraga pada periode Renstra 2025–2029 adalah meningkatnya partisipasi dan kualitas olahraga masyarakat secara berkelanjutan, serta terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, bugar, dan berkarakter melalui aktivitas olahraga rutin. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kunci yang selaras dengan RPJMN 2025–2029, yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga. Pada periode ini, ditargetkan terjadi peningkatan signifikan menuju kisaran 12–13 persen penduduk yang aktif berolahraga secara teratur, dengan fokus pada peningkatan proporsi penduduk yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir. Target tersebut merupakan pondasi awal menuju visi jangka panjang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yaitu 70 persen masyarakat Indonesia aktif berolahraga secara rutin pada tahun 2045.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga menetapkan sejumlah program dan strategi prioritas. Program Jam Krida Olahraga (JAMKRIDA) diarahkan sebagai instrumen pembiasaan olahraga melalui kewajiban aktivitas olahraga di lingkungan sekolah, pesantren, perguruan tinggi, serta instansi pemerintahan. Festival Olahraga Tradisional dikembangkan sebagai upaya pelestarian dan revitalisasi olahraga berbasis budaya lokal, sekaligus memperluas daya tarik olahraga di masyarakat. Turnamen Antar Kampung (TARKAM) difokuskan untuk mendorong partisipasi massal melalui kompetisi olahraga tingkat desa dan kelurahan, sementara pelaksanaan *Car Free Day* Nasional dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi olahraga masyarakat secara rutin.

Pelaksanaan program pembudayaan olahraga didukung oleh strategi penguatan ekosistem olahraga masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor, sosialisasi berkelanjutan, serta pemantauan berbasis data melalui instrumen seperti Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah, termasuk dalam pencapaian indikator RPJMN. Selain itu, pembudayaan olahraga diintegrasikan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia unggul, sehat, dan berkarakter sebagaimana ditetapkan dalam prioritas nasional RPJMN. Penajaman target dan indikator kinerja di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga terus dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan rapat tindak lanjut, guna memastikan target yang ditetapkan bersifat terukur, realistis, dan berdampak nyata bagi peningkatan partisipasi olahraga masyarakat.

Pohon kinerja merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang menggambarkan hubungan logis antara tujuan strategis, sasaran kinerja, indikator, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah. Melalui pohon kinerja, arah pencapaian hasil organisasi dapat dipetakan secara sistematis sehingga setiap kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap sasaran strategis. Penyusunan pohon kinerja juga berperan penting dalam memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, sekaligus

memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pohon kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga bisa dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

2. Rencana Kerja

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serangkaian langkah intelektual yang dilakukan secara kolektif. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian terkait kebijakan, kerangka pendanaan, kelembagaan, regulasi, serta evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Rencana Kerja (Renja) berperan sebagai panduan pelaksanaan yang membantu menyelaraskan kegiatan sehari-hari dengan tujuan dan pencapaian organisasi.

Sebagai bentuk Rencana Kerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga melaksanakan 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi Tahun Anggaran 2025:

KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah pemberian layanan hukum, layanan yang berhubungan dengan masyarakat dan data, layanan protokoler pendampingan pejabat, layanan rumah tangga kedeputian, kearsipan, dan layanan perkantoran dan perbendaharaan satuan kerja

KRO 2 : Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah pemberian layanan SDM dan pengembangan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

KRO 3 : Layanan Manajemen Kinerja Internal

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah penyusunan laporan keuangan satuan kerja dan BMN serta layanan reformasi kinerja berupa dukungan percepatan RB, SPIP, Manajemen Risiko, dan Zona Integritas

Asisten Deputy Olahraga Layanan Khusus melaksanakan 4 (empat) Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi pada Tahun Anggaran 2025 yaitu:

KRO 1 : Koordinasi

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus

KRO 2 : Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Olahraga Layanan Khusus

KRO 3 : Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah Penyaluran Bantuan Sarana Kepada Lembaga Olahraga Layanan Khusus

KRO 4 : Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan Festival/Pekan Olahraga Layanan Khusus, Festival Olahraga Disabilitas, Lansia, dan Warga Binaan

Asisten Deputi Olahraga Pendidikan melaksanakan 3 (tiga) Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi pada Tahun Anggaran 2025 yaitu:

KRO 1 : Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah Pemberian Fasilitas Pembinaan Bantuan Penyelenggaraan pada Warga Belajar/ Physical Activity dan KIE Pembinaan dan Pengembangan aktivitas jasmani

KRO 2 : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah Penyelenggaraan Kampanye/Festival Olahraga Pendidikan berupa Festival Bulutangkis dan Sepakbola Usia Sekolah, Festival Olahraga Pendidikan, dan Festival Olahraga Usia Dini. Selain itu juga diadakan Identifikasi Antropometri dan Fisik - Tes Kebugaran Pelajar Nusantara (TKPN) dan penyusunan Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (JOPI)

KRO 3 : Bantuan Lembaga

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana olahraga pendidikan

Asisten Deputi Olahraga Masyarakat melaksanakan 3 (tiga) Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi pada Tahun Anggaran 2025 yaitu:

KRO 1 : Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah pengambilan data *sampling* Indeks Pembangunan Olahraga dan penyusunan laporannya

KRO 2 : Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah pemberian fasilitas kepada lembaga olahraga masyarakat atau yayasan seperti bantuan FORNAS VIII 2025 dan bantuan kegiatan kampanye Gerakan Ayo Olahraga

KRO 3 : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan Kejuaraan Tarkam, HAORNAS XLII, PORTRADNAS, Senam Kebugaran Otak Indonesia, ASEAN *Sport Day*, Merdeka RUN, dan *Fun Walk* bersama SERUNI

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga melaksanakan 4 (empat) Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi pada Tahun Anggaran 2025 yaitu:

KRO 1 : Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah dan Finalisasi Pedoman Juknis Kurikulum, Monitoring Pendataan Tenaga Pembudayaan Olahraga Masyarakat, Pendidikan dan Layanan Khusus dan Penyusunan dan Finalisasi Pedoman Juknis Kurikulum, Monitoring Pendataan Induk Organisasi Pembudayaan Olahraga (IOPO)

KRO 2 : Koordinasi

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah Rapat Koordinasi / Sinkronisasi dan Sosialisasi Program Tenaga Olahraga Masyarakat, Pendidikan, dan Layanan Khusus dan

Supervisi Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan Program Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga

KRO 3 : Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah Peningkatan Profesionalitas Tata Kelola Dan Kapasitas Manajemen Induk Organisasi Pembudayaan Olahraga (IOPO), Konsinyering *Mapping* Pendataan Fasilitas Tenaga Dan Organisasi Pembudayaan Olahraga, dan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pemerintah kepada Induk Organisasi Pembudayaan Olahraga (IOPO) dan Pembudayaan Olahraga Pencak Silat Dalam Rangka Dukungan

KRO 3 : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Layanan Khusus

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rentang waktu 2025-2029, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengalami perubahan SOTK sekali dan juga perubahan jabatan dari struktural menjadi jabatan fungsional, ini tentu mempengaruhi Indikator Kinerja Utama yang tersusun selama lima tahun. Dan pada Laporan Kinerja ini Indikator Kinerja Utama akan menampilkan sesuai SOTK baru yang tergambar dan menyesuaikan kegiatan yang tercantum dalam Rincian Kertas Kerja]Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025. Adapun Indikator Kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir	36,71	39,41	42,11	44,80	47,50

4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja juga menggambarkan target

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode waktu tertentu.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 2025-2029 yang ditetapkan secara tersendiri. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada bulan Januari 2025 dan diperbarui Kembali pada bulan Juli 2025 setelah diresmikannya SOTK baru Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga	1.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir	36,71%
		1.2 Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat	0,23
		1.3 Persentase Provinsi yang Menyelenggarakan Kampanye Olahraga	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan professional	2.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	76,5
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	83,5
		2.3 Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	3
		2.4 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80

		2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	89.2
		2.6 Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	76.5
		2.7 Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	81%
		2.8 Persentase Temuan LHP BPK	82%
		2.9 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75%

Rencana Aksi

Rencana aksi ini menggambarkan rencana Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tujuan disusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2025, yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya unit secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2025.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja serta target pencapaian kinerja lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Tersusunnya Rencana Aksi dapat menjadi tolak ukur dalam pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025. Dalam rencana aksi kinerja ini menyajikan program, kegiatan, serta memuat pembagian target kinerja yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja. Rencana aksi tahun 2025 terlampir di lampiran Laporan Kinerja (LKj).

5. Postur Anggaran

Pada bagian selanjutnya disajikan data dukungan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
SESUAI DENGAN DIPA AWAL NOMOR: DIPA-092.01.1.418139/2025

No	Kode Program	Unit Teknis	Pagu Anggaran
1	3820	Asisten Deputi Bidang Olahraga Layanan Khusus	Rp13.967.842.000
2	3821	Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan	Rp13.208.958.000
3	3822	Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat	Rp37.949.432.000
4	1720	Dukungan Manajemen Deputi Pembudayaan Olahraga	Rp5.000.000.000
Total Pagu Anggaran			Rp70.126.232.000

Pada pelaksanaannya sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa kali revisi dan penyesuaian anggaran diantaranya revisi perubahan SOTK Kementerian Pemuda dan Olahraga, revisi buka blokir, dan revisi internal mengikuti dengan kondisi, kebutuhan, dan perubahan pola pelaksanaan kegiatan di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Berikut adalah rincian pagu anggaran setelah revisi.

No	Kode Program	Unit Teknis	Pagu Anggaran
1	3820	Asisten Deputi Bidang Olahraga Layanan Khusus	Rp13.000.000.000
2	3821	Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan	Rp27.000.000.000
3	3822	Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat	Rp30.000.000.000
4	7846	Asisten Deputi Bidang Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	Rp5.300.000.000
5	1720	Dukungan Manajemen Deputi Pembudayaan Olahraga	Rp4.700.000.000
Total Pagu Anggaran			Rp80.000.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja *[How we measure success]*

Pengukuran Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan Indikator Kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada PK yang juga dicapai oleh kegiatan pendukung yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga. Adapun pemetaan kegiatan yang disesuaikan dengan target kinerja dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
1	Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	● Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga minimal 3 kali dalam selama seminggu terakhir, minimal 60 menit, dan dilakukan dengan intensitas sedang. ● Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 10 tahun sampai dengan 60 tahun yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 10 tahun sampai dengan 60 tahun. $\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ A : Jumlah Responden Umur 10 Tahun ke Atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir B : Jumlah Responden Umur 10 Tahun ke Atas ● Data didapatkan dari responden dengan menggunakan instrumen skala/angket.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
2		Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat	● Indeks kebugaran jasmani masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kebugaran jasmani nasional dengan kategori baik ke atas. Indeks kebugaran diukur melalui perhitungan nilai VO2max, yakni berupa derajat kapasitas aerobik maksimum. ● Nilai VO2max dapat diukur dengan Metode <i>Rockport Test</i> atau MFT. ● Metode <i>Rockport Test</i> adalah suatu metode untuk mengukur kebugaran seseorang dengan cara berjalan atau berlari kecil sejauh 1,6 kilometer (1 mil) secepat mungkin. ● Metode MFT adalah singkatan dari metode <i>Multistage Fitness Test</i> yang merupakan tes kebugaran untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi (VO2 Max) dengan berlari bolak-balik mengikuti bunyi beep. $\frac{A}{B} \times 100\%$ A : Jumlah penduduk umur 10-60 tahun yang memiliki kategori kebugaran Baik ke atas B : Jumlah penduduk umur 10-60 tahun
3		Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	● Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga adalah indikator yang menunjukkan seberapa banyak provinsi di Indonesia yang telah

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
			menyelenggarakan kampanye olahraga di lingkup Olahraga Layanan Khusus, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Pendidikan pada satu tahun anggaran berjalan. ● Kampanye olahraga yang dilakukan dapat berupa kebijakan, himbauan, dan/atau kegiatan/keolahragaan yang diikuti oleh masyarakat umum dalam rangka pembudayaan olahraga. $\% \text{ Provinsi Kampanye Olahraga} = \frac{A}{B} \times 100\%$ A : Jumlah provinsi yang melakukan Kampanye Olahraga B : Jumlah provinsi di Indonesia
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan professional	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	● SAKIP merupakan kepanjangan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ● SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan : ○ penetapan dan pengukuran, ○ pengumpulan data, ○ Pengklasikasian, ○ pengikhtisaran, dan ○ pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka untuk mengetahui kualitas pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
			Kementerian Pemuda dan Olahraga $\text{Nilai PMSAKIP} = \sum \text{Bobot}_{ij}$ $\sum \text{Bobot}_{ij} : \text{Bobot pada komponen ke-} i \text{ dan sub-komponen ke-} j$ $i : \text{Komponen}$ $j : \text{Sub-Komponen}$
5		Indikator Kualitas Pengguna Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	● Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap : ○ Perencanaan, ○ efektivitas pelaksanaan anggaran, ○ efisiensi pelaksanaan anggaran, dan ○ kepatuhan terhadap regulasi. $\text{IKPA} = \sum_{i=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot}_i) - \text{Pengurang Dispensasi SPM}$
6		Indeks Pengelolaan Aset pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	● Indeks Pengelolaan Aset mengukur kualitas kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi pengelolaan, kepatuhan, pengawasan, dan pengendalian serta keandalan administrasi BMN pada satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Barang.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
			IPA Satuan Kerja = Σ (Parameter 1 + 2 + 3+ 4) 1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang - undangan; 3. Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif; 4. Administrasi BMN yang Andal.
7		Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	● Nilai Kinerja Anggaran adalah ukuran kinerja anggaran berdasarkan nilai efektivitas dan efisiensi (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023) Nilai Kinerja Anggaran = NK Perencanaan Anggaran + NK Pelaksanaan Anggaran.
8		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	● Indiktor Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menggambarkan persepsi kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan/masyarakat terhadap layanan pada unit penyelenggara pelayanan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Indikator ini diukur berdasarkan komposit dari sembilan (9) unsur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
			berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. $\text{Nilai survei kepuasan masyarakat} = \sum_{i=1}^9 x_i \times b$
9		Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	● Indikator Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga digunakan untuk mengetahui kualitas pengelolaan kearsipan di lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Hasil pengawasan kearsipan = (12,5% x Nilai Aspek Penciptaan) + (12,5% x Nilai Aspek Pemeliharaan) + (12,5% x Nilai Aspek Penggunaan) + (12,5% x Nilai Aspek Penyusutan) + (25% x Nilai Aspek Sumber Daya Kearsipan) + (25% x Nilai Aspek Sarana Prasarana)
		Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	● Indikator Pengembangan Kompetensi ASN adalah mengukur upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan kerja Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan setiap tahunnya

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
			oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. $\frac{\text{Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek}}{\text{Seluruh pegawai pada kedeputian}} \times 100\%$
10		Persentase Temuan LHP BPK	● Pengukuran indikator ini merujuk pada total temuan yang ada pada masing-masing Satuan Kerja yang akan disampaikan oleh Inspektorat melalui nota dinas kepada Deputi dengan rumus penghitungan sebagai berikut: $\frac{\text{Rekomendasi yang dituntaskan dari hasil audit BPK/APIP}}{\text{Jumlah seluruh temuan dari 3 tahun sebelumnya}} \times 100\%$
11		Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	● Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah dokumen yang berisi langkah-langkah strategis dan terperinci untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi di suatu instansi. Dokumen ini disusun berdasarkan permasalahan yang muncul pada tema-tema tertentu. Indikator ini digunakan untuk memonitor pelaksanaan rencana aksi yang telah dicanangkan pada awal Triwulan ke-I sehingga dalam pelaksanaan realisasinya bisa menjadi lebih terarah dan terukur. $\frac{A}{B} \times 100\%$ A: Jumlah output pada indikator RB Tematik yang dilaksanakan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
			oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga B: Jumlah target output pada indikator RB Tematik yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

2. Capaian Kinerja *[Our measurement results]*

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian mengukur realisasinya.

Dalam mengukur kinerja Deputi Pembudayaan Olahraga mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja *output* dan *outcome*, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator masukan berupa dana, sedangkan indikator keluaran dan hasil meliputi jumlah orang, jumlah buku, jumlah pedoman, jumlah lembaga dan satuan lainnya. Berkaitan dengan indikator-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kegiatan.
2. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.
3. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari: masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
4. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran.
5. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*).
6. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja

instansi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomian dan efektivitas.

Evaluasi sangat penting dilakukan khususnya analisis yang menyangkut keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran; evaluasi sungguh-sungguh terhadap kegiatan tahun yang lalu dengan sasaran yang ingin dicapai; penentuan indikator kinerja; dan kegiatan inti organisasi. Sebagai salah satu elemen terpenting dalam penerapan Laporan Kinerja, tahapan pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja keberhasilan (IKU), pengumpulan data kinerja, penilaian capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran digunakan indikator kinerja *outcome* dan indikator kinerja *output*, yang merupakan gambaran dari ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah tabel pengukuran kriteria ketercapaian target indikator:

Rentang Capaian (%)	Kategori Capaian	Keterangan
Capaian ≥ 90	Sangat Baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
$70 < \text{Capaian} \leq 90$	Baik	
$50 < \text{Capaian} \leq 70$	Cukup	
Capaian ≤ 50	Kurang	

Berdasarkan perjanjian kinerja organisasi di Deputy Pembudayaan Olahraga Tahun 2025, maka hasil capaian kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga	1.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir	36,71%	33,40%	90,98%
		1.2 Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat	0,230	0,347	150,87%
		1.3 Persentase Provinsi yang	100%	100%	100,00%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
		Menyelenggarakan Kampanye Olahraga			
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan professional	2.1 Nilai PM SAKIP Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	76,5	73,16	95,63%
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	83,5	81,78	97,94%
		2.3 Indeks Pengelolaan Aset Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	3	3,50	116,67%
		2.4 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	80	83,39	104,24%
		2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	89.2	90,76	101,75%
		2.6 Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputy Bidang	76.5	72,1	94,25%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
		Pembudayaan Olahraga			
		2.7 Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	81%	100%	123,46%
		2.8 Persentase Temuan LHP BPK	82%	94,70%	115,49%
		2.9 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75%	75%	100,00%

Dari sasaran yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa Deputi Pembudayaan Olahraga mempunyai 12 capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dihitung secara umum tercapai 107,61% atau berkategori **Sangat Baik**. Terdapat 1 indikator kinerja utama yang belum tercapai yaitu Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir.

Dalam capaian realisasi anggaran, dari pagu sebesar **Rp80.000.000.000** dengan realisasi daya serap berdasarkan asumsi kegiatan yang telah dilaksanakan serta perhitungan internal Sekretariat Deputi Pembudayaan Olahraga sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp79.381.940.532** (99,23%).

Analisis Capaian Kinerja *[Our analysis of our results]*

A. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir	Target	35,40%	36,39%	37%	40%	36,71%
	Realisasi	28,60%	28,4%	25,4%	26,3%	33,40%

Prolog

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap aktivitas fisik dan olahraga. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup aktif dan sehat, tetapi juga menjadi cerminan efektivitas berbagai program dan kebijakan pembangunan olahraga yang telah dilaksanakan. Tingginya persentase partisipasi olahraga diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kebugaran jasmani, kesehatan masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan aktivitas olahraga selama seminggu terakhir diperoleh dari hasil penghitungan Indeks Pembangunan Olahraga pada dimensi partisipasi olahraga. Pengumpulan data dilakukan melalui metode random sampling dengan menggunakan instrumen angket yang disebarakan kepada responden, sehingga data yang dihasilkan dapat merepresentasikan tingkat partisipasi olahraga masyarakat secara umum.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga memiliki keterkaitan yang erat dengan capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), khususnya pada dimensi yang mengukur perilaku dan keterlibatan aktif individu dalam aktivitas fisik. Peningkatan persentase penduduk yang berolahraga secara rutin menjadi indikator positif terhadap keberhasilan pembangunan olahraga yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pada pembudayaan olahraga di masyarakat. Partisipasi yang konsisten diharapkan mampu mendorong peningkatan kebugaran jasmani, menekan risiko penyakit tidak menular, serta memperkuat kontribusi olahraga dalam pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

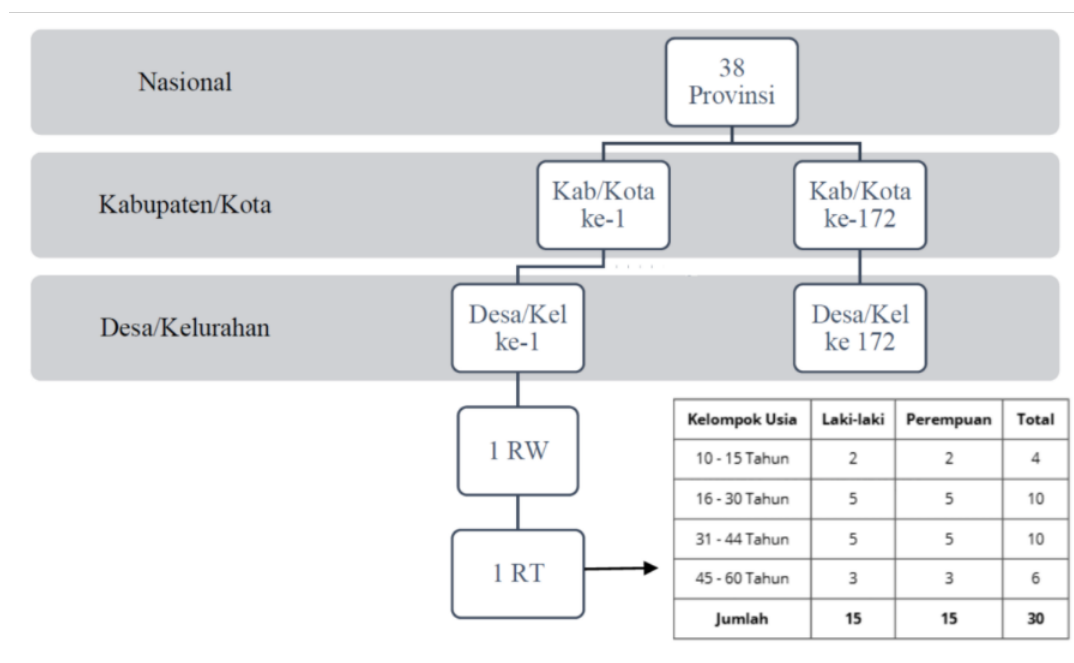
Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2025 merupakan kelanjutan dan penguatan dari pelaksanaan IPO pada periode sebelumnya. IPO 2025 dirancang dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan tata kelola data dan peran unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari sisi tata kelola, pelaksanaan IPO 2025 melibatkan Asisten Deputi Olahraga Masyarakat dan Biro PMKD sesuai pembagian dimensi. Dalam penghitungan dan penyusunan laporan IPO tahun 2025, Asisten Deputi Olahraga Masyarakat didampingi langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS) diposisikan sebagai mitra strategis utama dalam memastikan bahwa desain pengukuran, metode pengambilan sampel, serta instrumen pengumpulan data memenuhi kaidah statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara substansi, IPO 2025 tetap mengukur sembilan dimensi pembangunan olahraga, yaitu literasi fisik, partisipasi, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, kebugaran, sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka olahraga, dan performa olahraga. Penyesuaian dilakukan pada metode pengumpulan data, sumber data, serta mekanisme koordinasi antar unit kerja guna meningkatkan kualitas dan konsistensi data. Pengumpulan data pada dimensi literasi fisik, partisipasi, perkembangan personal, kesehatan, dan ekonomi tetap dilakukan melalui angket responden untuk menjaga kesinambungan data antar tahun, dengan penguatan pada sistem pengelolaan dan validasi data. Sementara itu, pengukuran dimensi kebugaran menggunakan *Rockport Test* sebagai pengganti *Multistage Fitness Test* (MFT), dengan pertimbangan kemudahan pelaksanaan, keamanan, dan kesesuaian dengan karakteristik responden. Pada dimensi sumber daya manusia olahraga, data difokuskan pada guru dan pelatih olahraga yang diperoleh melalui koordinasi dengan unit kerja terkait di tingkat pusat. Dimensi ruang terbuka olahraga difokuskan pada data Gedung Olahraga dan stadion, sedangkan dimensi performa olahraga diukur berdasarkan perolehan medali pada ajang Pornas ASN dan Peparpenas ASN.

Penentuan wilayah sampling IPO Tahun 2025 dilakukan menggunakan metode *random sampling*. Metode ini memastikan setiap wilayah dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai lokasi pengumpulan data, sesuai dengan kaidah statistik dan rekomendasi dari BPS.

Berdasarkan metode tersebut, ditetapkan sebanyak 172 wilayah sampling yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, mencakup kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Sebaran wilayah ini dirancang untuk merepresentasikan keberagaman kondisi geografis, demografis, dan sosial masyarakat, sehingga hasil pengukuran IPO 2025 diharapkan mampu menggambarkan kondisi pembangunan olahraga secara nasional. Penetapan wilayah sampling tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Lokasi

Sampling Pengukuran Pembangunan Keolahragaan Nasional Tahun 2025 yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar administratif dan sarana koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di daerah agar berjalan tertib dan terkoordinasi. Seluruh data yang dihimpun, baik data primer maupun data sekunder, diinput langsung ke dalam aplikasi IPO yang disusun oleh tim IPO dari Asisten Deputy Olahraga Masyarakat. Untuk menjamin kualitas dan kebenaran data, pencacah diwajibkan mengunggah bukti dukung berupa foto responden dan dokumentasi kegiatan pengambilan data. Bagan di bawah ini merupakan rincian pengambilan *sampling* pada 172 Kab/Kota tersebut.

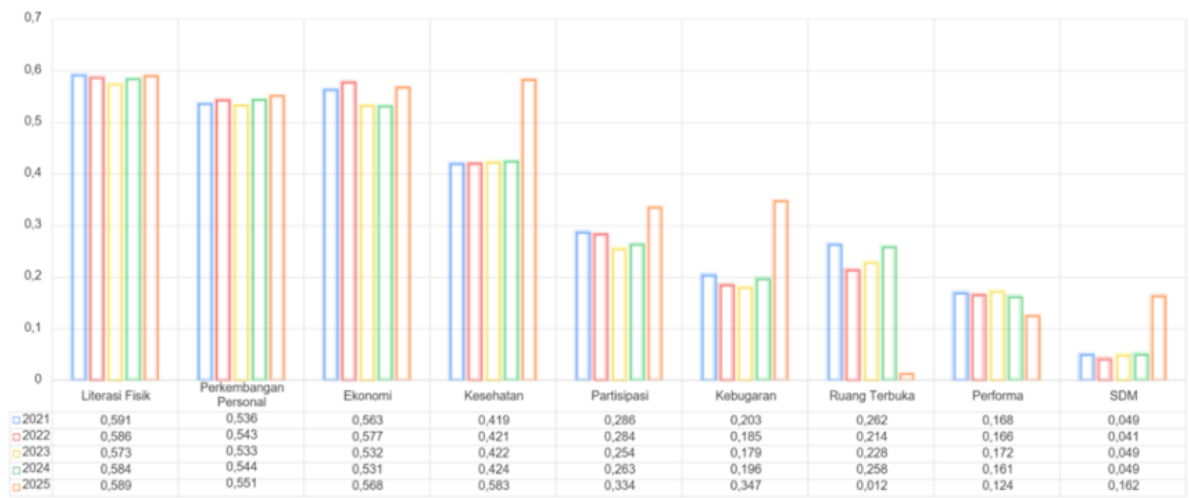


Secara teknis, perhitungan Indeks Pembangunan Olahraga diawali dengan pengolahan data individu dan wilayah pada masing-masing dimensi. Data yang telah divalidasi diolah melalui proses standarisasi dan penghitungan skor sesuai dengan rentang nilai yang ditetapkan untuk menghasilkan nilai per dimensi. Nilai dimensi tersebut selanjutnya diagregasikan dengan mempertimbangkan bobot penduduk berdasarkan kelompok usia dan wilayah administratif. Tahap akhir dilakukan dengan menggabungkan seluruh nilai dimensi untuk memperoleh nilai Indeks Pembangunan Olahraga secara keseluruhan.

IPO dan Partisipasi Olahraga



Pada grafik di atas bisa terlihat bahwa IPO pada tahun 2025 mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, IPO menunjukkan angka sebesar 33,4% sedangkan pada tahun 2025 menunjukkan angka sebesar 36,3%. Angka tersebut telah melebihi target dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 yaitu 33,8%.



Perkembangan masing-masing dimensi Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) selama periode 2021–2025 menunjukkan variasi capaian yang menggambarkan perbedaan tingkat kemajuan pembangunan olahraga nasional pada berbagai area prioritas. Secara umum, dimensi yang berkaitan dengan aspek perilaku masyarakat, seperti Literasi Fisik dan Dimensi Personal, cenderung menunjukkan capaian yang lebih konsisten, sementara dimensi yang bersifat operasional, termasuk sumber daya manusia dan performa olahraga, masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Dimensi Partisipasi mengalami penurunan tajam pada periode awal sebelum kembali membaik. Partisipasi turun dari 0,286 pada 2021 menjadi 0,254 pada 2023, sebelum pulih ke 0,334 tahun 2025. Terjadi peningkatan partisipasi olahraga masyarakat yang berdampak

pada perbaikan tingkat kebugaran. Kondisi ini menunjukkan tantangan signifikan dalam mendorong keterlibatan langsung masyarakat berolahraga pada fase awal pengukuran IPO, tetapi juga keberhasilan kebijakan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya.

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga melaksanakan berbagai program strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga sebagai bagian dari pembudayaan olahraga dan peningkatan kebugaran nasional. Program-program tersebut dirancang agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta mendorong keterlibatan aktif komunitas dan daerah.

Program yang dilaksanakan antara lain Kejuaraan Antarkampung (TARKAM) yang diselenggarakan di berbagai daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga, serta memanfaatkan olahraga sebagai sarana pemersatu sosial. Selain itu, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga juga mendorong pelaksanaan olahraga massal melalui kegiatan senam bersama, fun run, gerak jalan, serta pengembangan olahraga tradisional yang berbasis kearifan lokal.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi olahraga secara berkelanjutan, olahraga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis sebagai fondasi pembiasaan aktivitas fisik sejak usia dini. Melalui penguatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di satuan pendidikan, serta sinergi dengan kementerian dan pemerintah daerah terkait, olahraga diperkenalkan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Olahraga pendidikan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kebugaran peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan kebiasaan hidup aktif yang berpotensi berlanjut hingga usia dewasa.

Selain itu, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga juga memberikan perhatian terhadap pengembangan olahraga layanan khusus bagi kelompok masyarakat dengan kebutuhan spesifik, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan warga binaan pemasyarakatan. Melalui penyediaan program olahraga yang adaptif, inklusif, dan aman, kelompok-kelompok tersebut tetap memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas olahraga sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.

Seluruh upaya tersebut diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga masyarakat, serta peningkatan literasi olahraga. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga layanan khusus, diharapkan partisipasi olahraga masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kebugaran serta capaian Indeks Pembangunan Olahraga.

Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan pembudayaan olahraga, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga masih menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi upaya peningkatan partisipasi olahraga masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah karakteristik sebagian program kegiatan yang masih bersifat seremonial dan berorientasi pada pelaksanaan event, sehingga dampaknya terhadap perubahan perilaku olahraga masyarakat secara berkelanjutan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menyebabkan peningkatan partisipasi cenderung terjadi pada periode tertentu dan belum konsisten sepanjang waktu.

Selain itu, dinamika kebijakan yang mengikuti perubahan kepemimpinan turut mempengaruhi kesinambungan program pembudayaan olahraga. Perubahan arah dan prioritas program dari waktu ke waktu berimplikasi pada terbatasnya ruang untuk membangun program jangka menengah dan panjang yang berkelanjutan, serta menyulitkan proses penguatan budaya olahraga secara sistematis di masyarakat.

Hambatan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, khususnya dalam mendorong kebijakan berolahraga bagi aparaturnya serta masyarakat luas. Keterbatasan sinergi tersebut berdampak pada belum terintegrasinya pembudayaan olahraga sebagai bagian dari kebijakan lintas sektor, sehingga potensi pemanfaatan lingkungan kerja, fasilitas publik, dan ruang sosial sebagai sarana pembudayaan olahraga belum sepenuhnya tergarap.

1. *Fluktuasi Partisipasi Olahraga Masyarakat*

Meskipun secara umum Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) mengalami peningkatan, dimensi partisipasi olahraga menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, khususnya pada periode awal pengukuran. Penurunan partisipasi pada tahun 2021–2023 mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga konsistensi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga secara rutin.

2. *Kesenjangan Akses Sarana dan Prasarana Olahraga*

Sebaran wilayah sampling yang mencakup kondisi geografis dan sosial yang beragam menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki akses sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Keterbatasan fasilitas olahraga, terutama di wilayah tertentu, berpotensi menghambat minat dan kesempatan masyarakat untuk berolahraga secara berkelanjutan.

3. *Keterbatasan Sumber Daya Manusia Olahraga*

Dimensi sumber daya manusia olahraga masih memerlukan penguatan. Ketersediaan dan kualitas guru serta pelatih olahraga yang belum merata menjadi kendala dalam

mendorong pembudayaan olahraga, khususnya pada tingkat pendidikan dan komunitas masyarakat.

4. *Kesadaran dan Literasi Olahraga yang Belum Merata*

Walaupun literasi fisik menunjukkan capaian yang relatif konsisten, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menjadikan olahraga sebagai kebutuhan dan gaya hidup. Rendahnya kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi olahraga di beberapa kelompok masyarakat.

5. *Tantangan Teknis dalam Pengumpulan dan Validasi Data*

Pengumpulan data IPO yang melibatkan wilayah luas dan jumlah sampel besar menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan kapasitas pencacah, perbedaan pemahaman responden terhadap instrumen angket, serta kebutuhan validasi data yang ketat untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas hasil pengukuran.

6. *Keterbatasan Program yang Berkelanjutan dan Inklusif*

Meskipun berbagai program peningkatan partisipasi telah dilaksanakan, tantangan masih muncul dalam memastikan keberlanjutan program serta keterjangkauannya bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok dengan kebutuhan khusus lainnya.

Pada tahun 2025, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga telah berupaya untuk melakukan peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga dalam beberapa program dan kegiatan. Berikut adalah program dan kegiatan yang telah diselenggarakan dalam kurun waktu 1 tahun di 2025:

1. Asisten Deputy Olahraga Masyarakat

- 1 HAORNAS XLII
- 2 Kejuaraan Antar Kampung (TARKAM)
- 3 Festival Olahraga Tradisional
- 4 Senam Kebugaran Otak Indonesia
- 5 Aktivasi Olahraga Masyarakat
- 6 Fun Walk bersama Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih (SERUNI) dan pelaksanaan ASEAN Sports Day

HAORNAS XLII, Kejuaraan Tarkam, Festival Olahraga Tradisional, Senam Kebugaran Otak Indonesia, Aktivasi Olahraga Masyarakat, Fun Walk bersama Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih (SERUNI) dan pelaksanaan ASEAN Sports Day.

Kampanye Olahraga Masyarakat tahun 2025 menghadirkan serangkaian program strategis seperti Puncak HAORNAS XLII di Cibubur dengan tema "Olahraga Satukan Kita", Kejuaraan Tarkam di 47 lokasi seluruh Indonesia, hingga ASEAN Sports Day di Yogyakarta. Selain bertujuan mencari bibit atlet dan melestarikan olahraga tradisional, rangkaian acara ini termasuk Festival Olahraga Tradisional di Cimahi dan Sidoarjo serta kegiatan bersama komunitas SERUNI yang dirancang untuk mempererat hubungan antar-masyarakat. Fokus utama dari berbagai agenda ini adalah meningkatkan partisipasi publik dalam bergaya hidup sehat sekaligus memperkenalkan kearifan lokal ke kancah yang lebih luas.

Di sisi lain, Kemenpora konsisten mendorong kebugaran jasmani melalui inovasi Senam Kebugaran Otak Indonesia dan kegiatan rutin "Senam Bersama Jumat Krida" yang melibatkan ribuan partisipan serta pelaku UMKM. Integrasi antara olahraga dan pemberdayaan ekonomi ini terbukti efektif meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan menjaga imunitas tubuh. Secara keseluruhan, program-program tersebut tidak hanya berhasil menggerakkan roda ekonomi lokal melalui pameran dan komunitas, tetapi juga memastikan kelestarian olahraga tradisional serta tercapainya indeks kebugaran nasional yang lebih baik.

Tanggal	Nama Kegiatan	Lokasi	Fokus Utama / Cabang Olahraga
24 Agustus 2025	ASEAN Sports Day (ASD)	Yogyakarta	Heritage Ride, Spogomi, Senam Massal, & UMKM.
9 September 2025	Puncak HAORNAS XLII	Cibubur, Jakarta	Perayaan nasional bertema "Olahraga Satukan Kita".
28 September 2025	Festival Olahraga Tradisional	Kota Cimahi	Bakiak, Sumpitan, dan Toroktok.
28 November 2025	Festival Olahraga Tradisional	Kab. Sidoarjo	Panahan, Bakiak, dan Lari Balok.

Tanggal	Nama Kegiatan	Lokasi	Fokus Utama / Cabang Olahraga
6 Desember 2025	Fun Walk & Senam Nusantara (ISS)	GBK Senayan	Kolaborasi dengan SERUNI (Indonesia Sport Summit).
Setiap Jumat Pagi	Senam Jumat Krida	Kantor Kemenpora	Peningkatan kebugaran rutin & pemberdayaan UMKM.
Sepanjang 2025	Kejuaraan Tarkam	47 Lokasi (38 Prov)	SKJ, Senam Bugar, Fun Run, & Olahraga Tradisional.
Sepanjang 2025	Sosialisasi Senam Otak	Jabodetabek, Bantul, Palembang	Penyusunan & pengenalan Senam Kebugaran Otak.

2. Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus

Kelompok Penyandang Disabilitas (FOD) terdiri dari Senam bersama dan pengenalan cabang olahraga adaptif (Para Atletik, Para Catur, Para Tenis Meja, Para Bulu Tangkis, dan Boccia). **Kelompok Lanjut Usia / Lansia (FOL)** terdiri dari Jalan sehat, senam bersama, dan aktivitas fisik rekreatif massal. **Kelompok Warga Binaan Pemasyarakatan (FOWB)** terdiri dari Senam bersama dan pertandingan olahraga tim (Futsal dan Voli).

Pemerintah melalui Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus terus berupaya meningkatkan partisipasi olahraga di kalangan penyandang disabilitas, lansia, dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan target intensitas sedang minimal 150 menit per minggu. Program ini tidak hanya bertujuan untuk kebugaran fisik dan imunitas, tetapi juga sebagai sarana penjangkaran bakat atlet disabilitas serta peningkatan angka harapan hidup bagi lansia. Meskipun terdapat tantangan dalam pemutakhiran data nasional dari BPS (Susenas), survei mandiri dan pelaksanaan festival olahraga di berbagai daerah menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, bahkan melampaui angka *baseline* yang ditetapkan.

Untuk memastikan efektivitas program, setiap kegiatan dilengkapi dengan pengukuran kebugaran jasmani yang disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing kelompok, seperti *Rockport Walking Test* untuk disabilitas dan *Senior Fitness Test* untuk lansia. Pendekatan inklusif ini menggabungkan aktivitas rekreatif dengan pengumpulan data teknis untuk mengevaluasi kapasitas kardiorespirasi dan kekuatan otot peserta. Melalui Festival Olahraga Disabilitas (FOD), Festival Olahraga Lansia (FOL), dan Festival Olahraga Warga Binaan (FOWB), pemerintah berkomitmen menciptakan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

3. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

Kelompok Olahraga Pendidikan mencakup peserta didik usia sekolah (7–18 tahun) pada jalur pendidikan formal dan nonformal, dengan bentuk kegiatan berupa festival olahraga pendidikan (Festival Olahraga Pendidikan/FOP), kampanye olahraga di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, penguatan literasi fisik, serta pembinaan kebugaran jasmani siswa. Aktivitas yang dikembangkan meliputi olahraga permainan, aktivitas kebugaran jasmani, serta pengenalan cabang olahraga dasar yang disesuaikan dengan jenjang usia dan karakteristik peserta didik.

Pemerintah melalui Asisten Deputi Olahraga Pendidikan terus mendorong peningkatan partisipasi aktif berolahraga di kalangan peserta didik sebagai fondasi pembudayaan olahraga dan penyiapan sumber daya manusia unggul. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, persentase penduduk usia sekolah (7–18 tahun) yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir mencapai 82,21%, melampaui target yang ditetapkan. Program ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan literasi fisik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kebiasaan hidup aktif (*sport for life*) serta identifikasi awal bakat olahraga melalui pendekatan yang terencana dan berkelanjutan.

1. Festival Olahraga Pendidikan (FOP)

Festival Olahraga Pendidikan merupakan kegiatan berbasis event yang diselenggarakan di lingkungan satuan pendidikan sebagai sarana meningkatkan partisipasi aktif berolahraga peserta didik. FOP dirancang untuk memperkenalkan berbagai bentuk aktivitas fisik dan cabang olahraga yang sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, mulai dari olahraga permainan, atletik dasar, hingga aktivitas kebugaran jasmani.

Selain sebagai ajang partisipasi massal, FOP juga berfungsi sebagai media pemanduan bakat awal (talent identification) melalui pengamatan kemampuan motorik, koordinasi, dan daya tahan fisik peserta didik. Kegiatan ini menjadi pintu masuk pembinaan olahraga berkelanjutan serta memperkuat budaya olahraga di lingkungan sekolah.

2. Program Literasi Fisik Peserta Didik

Program literasi fisik merupakan kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kemampuan gerak dasar, kesadaran tubuh, serta pentingnya aktivitas fisik sepanjang hayat. Literasi fisik tidak hanya menekankan pada kemampuan melakukan gerakan, tetapi juga mencakup aspek motivasi, kepercayaan diri, dan pemahaman manfaat olahraga bagi kesehatan dan kualitas hidup.

Program ini dilaksanakan melalui workshop, sosialisasi, pengisian angket literasi fisik, serta integrasi materi literasi fisik dalam kegiatan kampanye dan festival olahraga. Literasi fisik menjadi fondasi penting agar peserta didik tidak hanya aktif bergerak, tetapi juga memiliki motivasi intrinsik untuk terus berolahraga di luar lingkungan sekolah.

3. Festival Bulutangkis Usia Sekolah Piala Menpora U-15

Festival Bulutangkis Usia Sekolah Piala Menpora U-15 merupakan kegiatan olahraga pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik usia sekolah menengah pertama hingga awal sekolah menengah atas (± 13 –15 tahun). Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan aktivitas pengenalan teknik dasar bulutangkis yang menekankan pada sportivitas, partisipasi, dan pengembangan keterampilan dasar.

Festival ini berfungsi sebagai media pembinaan dan penjarangan bakat awal pada cabang olahraga bulutangkis, sekaligus memperluas partisipasi siswa dalam olahraga terstruktur. Selain aspek kompetitif yang bersifat edukatif, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi kemampuan fisik, koordinasi, dan minat siswa terhadap cabang olahraga unggulan nasional.

4. Festival Sepakbola Usia Sekolah Dasar Piala Menpora U-12

Festival Sepakbola Usia Sekolah Dasar Piala Menpora U-12 ditujukan bagi peserta didik sekolah dasar usia 10–12 tahun. Kegiatan ini dirancang sebagai ajang pengenalan sepakbola yang menyenangkan dan aman, dengan menekankan pada penguasaan gerak dasar, kerja sama tim, dan nilai-nilai sportivitas.

Pada jenjang usia ini, festival tidak berorientasi pada prestasi semata, melainkan pada pengembangan literasi fisik dan keterampilan motorik dasar. Festival ini menjadi bagian dari tahap fundamental dalam pembinaan olahraga, di mana anak-anak dikenalkan pada aktivitas olahraga terorganisir sebagai pengalaman positif yang mendorong minat berolahraga jangka panjang.

5. Festival Sepakbola Usia Sekolah Piala Menpora U-15

Festival Sepakbola Usia Sekolah Piala Menpora U-15 merupakan lanjutan dari pembinaan sepakbola usia dini dan sekolah dasar, dengan sasaran peserta didik usia 13–15 tahun. Pada tahap ini, kegiatan mulai mengarah pada peningkatan kualitas permainan, pemahaman

taktik dasar, serta kesiapan fisik yang lebih baik.

Festival ini berperan sebagai jembatan antara olahraga pendidikan dan pembinaan prestasi, di mana peserta didik yang memiliki potensi dapat diidentifikasi untuk diarahkan ke pembinaan lanjutan melalui sekolah khusus olahraga, PPLP, atau klub sesuai kewenangan. Meski demikian, pendekatan olahraga pendidikan tetap dijaga agar kegiatan tetap inklusif dan berorientasi pada pembentukan karakter.

6. Festival Olahraga Usia Dini

Festival Olahraga Usia Dini merupakan kegiatan olahraga pendidikan yang menyasar anak usia dini (PAUD hingga kelas awal SD). Kegiatan ini berfokus pada aktivitas gerak dasar seperti berlari, melompat, melempar, menangkap, dan menjaga keseimbangan, yang dikemas dalam bentuk permainan edukatif dan menyenangkan.

Tujuan utama festival ini adalah membangun **fondasi literasi fisik sejak dini**, bukan kompetisi. Melalui festival ini, anak-anak diperkenalkan pada aktivitas fisik sebagai pengalaman yang menyenangkan, aman, dan sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Festival Olahraga Usia Dini menjadi pondasi penting dalam membentuk kebiasaan aktif bergerak yang berkelanjutan hingga jenjang pendidikan berikutnya.

Perbandingan Strategis Partisipasi Olahraga Nasional dan Internasional

Realisasi partisipasi olahraga penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas pada tahun 2025 tercatat sebesar **33,40%**. Angka ini menunjukkan pemulihan signifikan dari titik terendah sebesar **25,4%** pada tahun 2023, namun masih berada di bawah target kementerian sebesar **36,71%**. Jika disandingkan dengan *National Sport and Exercise Participation Survey* (NSPS) dari Singapura, Indonesia tertinggal cukup jauh. Singapura secara konsisten mencatatkan tingkat partisipasi di atas **70%**, didukung oleh ekosistem digital dan infrastruktur publik yang terintegrasi secara masif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami tren kenaikan, intensitas keterlibatan rutin masyarakat belum mencapai standar negara maju di kawasan regional.

Berdasarkan perbandingan dengan *Malaysia Sport Culture Index* (MSCI), Indonesia menghadapi tantangan serupa terkait keberlanjutan kebiasaan berolahraga, namun Malaysia memiliki angka partisipasi yang lebih stabil di kisaran **52%**. Di Indonesia, dimensi partisipasi dalam Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) menunjukkan fluktuasi tajam, yang mengindikasikan bahwa minat olahraga masyarakat masih sangat bergantung pada momentum tertentu. Sebaliknya, Malaysia lebih unggul dalam mengonsolidasikan olahraga komunitas di tingkat distrik, sehingga tingkat aktivitas fisiknya tidak terlalu bergantung pada penyelenggaraan acara besar secara seremonial sebagaimana yang masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan olahraga di Indonesia.

Melihat data dari *World Population Review* terkait tingkat aktivitas fisik global, posisi

Indonesia berada pada kategori menengah yang berisiko menghadapi masalah kesehatan jangka panjang akibat inaktivitas. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup atau gaya hidup tetap, yang tercermin dari capaian dimensi literasi fisik dan kesadaran yang belum merata. Sebaliknya, negara-negara dengan peringkat tinggi di *World Population Review* biasanya memiliki kebijakan tata kota yang mendukung mobilitas aktif, seperti jalur sepeda dan pejalan kaki yang aman, yang secara otomatis meningkatkan durasi aktivitas fisik mingguan masyarakat tanpa harus mengikuti ajang olahraga formal.

Terakhir, dalam kerangka *Global Health Index*, tingkat partisipasi olahraga di Indonesia yang masih berfluktuasi ini berdampak langsung pada profil kebugaran nasional dan angka risiko penyakit tidak menular. Program inklusif seperti Festival Olahraga Disabilitas (FOD) dan Festival Olahraga Lansia (FOL) memang menjadi nilai tambah bagi skor indeks layanan khusus Indonesia, namun dari sisi dampak kesehatan publik secara luas, Indonesia masih perlu mengejar standar internasional. Untuk meningkatkan daya saing di level global, Indonesia harus mengalihkan fokus dari program yang bersifat seremonial menuju penguatan infrastruktur berkelanjutan dan penyediaan sumber daya manusia olahraga yang merata di seluruh provinsi guna menjamin partisipasi aktif yang konsisten.

B. Persentase Provinsi yang Menyelenggarakan Kampanye Olahraga

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Provinsi yang Menyelenggarakan Kampanye Olahraga	Target	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Uraian Indikator Kinerja

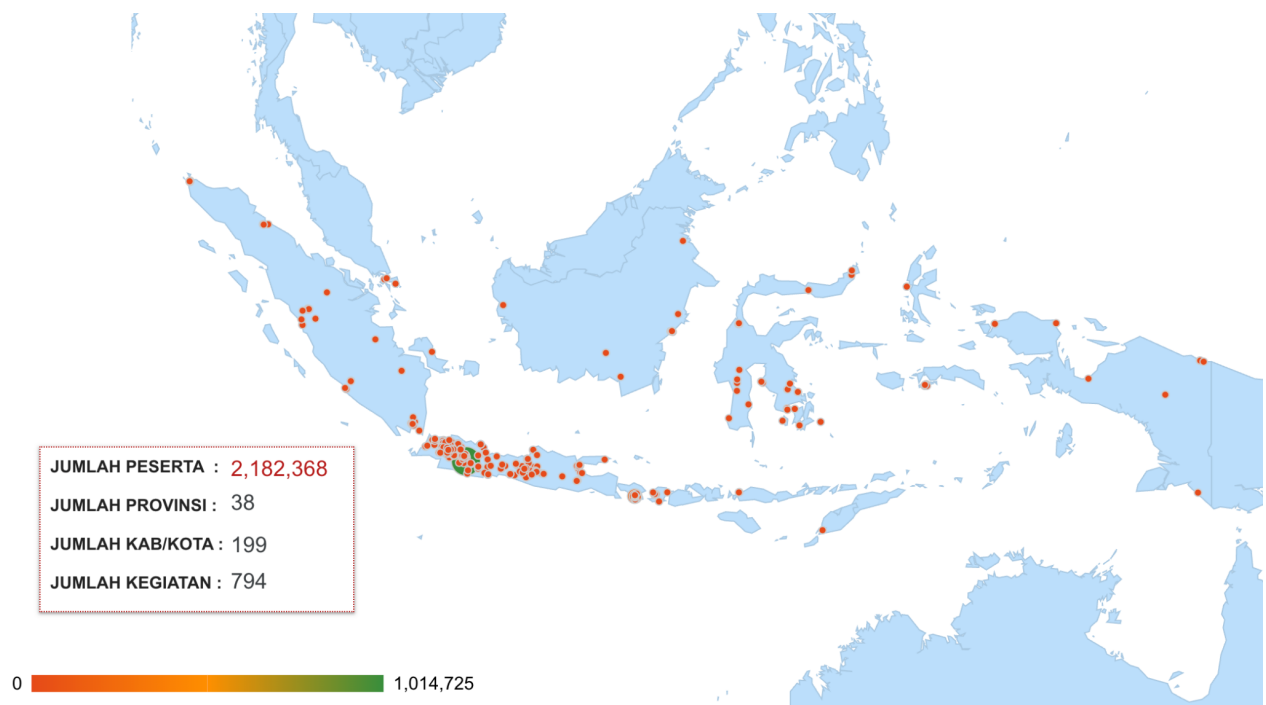
Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga adalah indikator yang menunjukkan seberapa banyak provinsi di Indonesia yang telah menyelenggarakan kampanye olahraga di lingkup Olahraga Layanan Khusus, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Pendidikan pada satu tahun anggaran berjalan.

Kampanye olahraga yang dilakukan dapat berupa kebijakan, himbauan, dan/atau kegiatan/keolahragaan yang diikuti oleh masyarakat umum dalam rangka pembudayaan olahraga.

Data

Berdasarkan data yang kami kumpulkan seluruh provinsi di Indonesia telah

menyelenggarakan kampanye olahraga. Berikut adalah visualisasi data terselenggaraan kampanye olahraga pada Provinsi di Indonesia.



Sumber data : <https://s.id/partisipasiolahraga>

Berdasarkan data yang kami dapatkan kampanye olahraga yang diselenggarakan terkonsentrasi di pulau jawa, sedangkan untuk pulau lainnya masih belum banyak data yang terkumpul.

Metode pengumpulan data dan hambatan

Data yang kami kumpulkan adalah berupa data kuantitatif yang kami kumpulkan dan olah di dalam aplikasi *spreadsheet*. Data tersebut merupakan deskriptif dari kegiatan yang dilaksanakan yang setidaknya mencakup nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan jumlah peserta.

Kami mengumpulkan data kegiatan terselenggara di suatu provinsi melalui tiga cara yaitu :

1. komunikasi langsung dengan dispora
2. komunikasi dengan penyelenggara kegiatan oleh unit di Kemenpora, atau
3. melalui data eksternal yang resmi.

Kami sadar bahwa dikarenakan keterbatasan akses data dan biaya, data yang telah kami kumpulkan belum mencakup seluruh kegiatan kampanye yang telah terselenggara di seluruh Provinsi, namun data ini telah mencukupi untuk bisa membuktikan bahwa telah terselenggara kegiatan Kampanye Olahraga di seluruh Provinsi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau daerah maupun yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Peningkatan dan visi untuk masa depan

Untuk mencapai terselenggaranya kampanye olahraga di seluruh Provinsi memang bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Kita bisa meyakini bahwa setidaknya setiap provinsi memiliki cukup partisipan olahraga untuk setidaknya bisa melaksanakan satu kegiatan olahraga. Meskipun begitu indikator ini adalah upaya mendorong aspek inklusivitas dari penyelenggaraan kampanye olahraga.

Salah satu tantangan dalam mewujudkan inklusivitas adalah dalam menghadapi perbedaan karakteristik masing-masing bagian. Kita ketahui bahwa setiap Provinsi memiliki karakteristik, demografis dan kultur yang berbeda beda. Hal tersebut membuat masing-masing Provinsi memiliki potensi yang berbeda dalam pengembangan Olahraga. Pendekatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan potensi tersebut juga unik untuk masing-masing Provinsi dan sebagian memiliki kesamaan dengan yang lain. Hal ini bisa didalami melalui pengumpulan data pada masing-masing Provinsi dengan lebih luas, seperti mencakup atribut dan karakter provinsi.

Ada banyak manfaat dengan mengelompokkan Provinsi berdasarkan atribut-atribut tertentu. Melalui pengkategorian tersebut kita bisa melihat mana Provinsi yang sudah memaksimalkan potensi olahraga-nya dan mana yang masih memiliki ruang untuk berkembang. Misal kita bisa memiliki ekspektasi potensi pengembangan olahraga yang besar di Provinsi yang memiliki populasi besar dan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi. Kemudian kita bisa melihat apakah pada daerah tersebut telah mencapai potensi terbaik mereka relatif dengan provinsi yang lain pada kategori yang sama. Hal ini bisa sangat membantu bagi pemerintah atau publik untuk dapat membuat keputusan pada ranah ini.

Apabila publik memiliki data informasi potensial olahraga di daerah, hal ini bisa mendorong investasi olahraga pada daerah tersebut. Hal yang membuat investor berani untuk melakukan investasi adalah cukup-nya informasi. Meskipun para investor juga sebagian nyaman dengan ketidakpastian, tapi ada perbedaan besar antara cukup informasi dan tidak ada informasi. Pengumpulan data penyelenggaraan di masing-masing Provinsi menunjukkan aktivitas investasi yang terjadi di Provinsi tersebut. Apabila di sangkutkan dengan data yang ada partisipasi olahraga di IPO, kita bisa melihat senggang antara jumlah investasi yang sudah dilakukan dengan potensi investasi yang belum dimanfaatkan.

C. Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
-------------------	-------	------	------	------	------	------

Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	Target	23,50%	26%	28%	30%	0,230
	Realisasi	20,3%	18,5%	17,9%	19,6%	0,347

Prolog

Indeks Kebugaran Jasmani merupakan indikator penting dalam pembangunan olahraga nasional karena mencerminkan kondisi fisik masyarakat sebagai hasil dari partisipasi aktif dalam aktivitas olahraga. Tingkat kebugaran yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), Indeks Kebugaran Jasmani memiliki keterkaitan erat dengan dimensi partisipasi olahraga. Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan menjadi faktor utama dalam peningkatan kebugaran jasmani, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya pembudayaan olahraga.

Dengan demikian, capaian Indeks Kebugaran Jasmani tidak hanya menggambarkan kondisi kebugaran masyarakat, tetapi juga menjadi refleksi keberhasilan kebijakan dan program pembangunan olahraga dalam mendorong masyarakat agar lebih aktif bergerak dan berolahraga secara berkelanjutan.

Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat pada IPO Tahun 2025

Perubahan penting pada pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 2025 terjadi pada pengukuran dimensi kebugaran. Jika pada periode sebelumnya digunakan *Multistage Fitness Test* (MFT), maka pada IPO 2025 digunakan *Rockport Test* sebagai instrumen pengukuran daya tahan kardiovaskular. Pergantian instrumen ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan pelaksanaan, keamanan responden, serta kesesuaian dengan karakteristik populasi yang diukur. Pengukuran kebugaran jasmani menggunakan metode Rockport adalah dengan berjalan atau berlari sejauh 1,6 kilometer kemudian hasil waktu tempuh dicatat dan diinput ke dalam aplikasi, yang selanjutnya secara otomatis mengolah data tersebut menjadi nilai VO2max dan klasifikasi tingkat kebugaran jasmani. Selain itu, dilakukan pula pencatatan data antropometri berupa tinggi badan dan berat badan responden, yang kemudian diolah oleh sistem menjadi nilai Indeks Massa Tubuh (IMT) beserta klasifikasinya.

Dimensi Kebugaran mengalami penurunan tajam pada periode awal sebelum kembali membaik. Indeks Kebugaran Masyarakat turun dari 0,203 menjadi 0,179 pada 2023 dan kemudian meningkat drastis ke 0,347 pada 2025. Terjadi peningkatan partisipasi olahraga

masyarakat yang berdampak pada perbaikan tingkat kebugaran. Kondisi ini menunjukkan tantangan signifikan dalam mendorong keterlibatan langsung masyarakat berolahraga pada fase awal pengukuran IPO, tetapi juga keberhasilan kebijakan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya.

Keterkaitan Partisipasi Olahraga dengan Tingkat Kebugaran Masyarakat

Perkembangan Indeks Kebugaran Masyarakat menunjukkan pola yang sejalan dengan dinamika partisipasi olahraga masyarakat. Pada periode awal pengukuran, Indeks Kebugaran mengalami penurunan dari 0,203 menjadi 0,179 pada tahun 2023, yang mencerminkan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Penurunan ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat partisipasi olahraga masyarakat pada periode yang sama, mengingat kebugaran masyarakat merupakan hasil akumulasi dari intensitas dan kontinuitas aktivitas fisik yang dilakukan.

Selain itu, penurunan indeks kebugaran pada fase awal juga mengindikasikan adanya tantangan dalam mendorong kualitas aktivitas olahraga masyarakat. Kegiatan olahraga yang dilakukan masih cenderung bersifat insidental dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pola hidup sehari-hari. Keterbatasan akses terhadap sarana olahraga, kurangnya pendampingan atau edukasi mengenai aktivitas fisik yang sesuai, serta belum optimalnya pembudayaan olahraga di lingkungan kerja dan ruang publik mempengaruhi rendahnya capaian kebugaran masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi olahraga masyarakat pada periode selanjutnya, Indeks Kebugaran Masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai 0,347 pada tahun 2025. Kondisi ini menegaskan hubungan antara partisipasi dan kebugaran, di mana peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga berpengaruh langsung terhadap perbaikan tingkat kebugaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan memiliki peran strategis dalam meningkatkan Indeks Kebugaran Masyarakat.

Penguatan pembudayaan olahraga ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah partisipasi, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan aktivitas olahraga masyarakat. Pendekatan yang lebih terintegrasi, konsisten, serta didukung sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga agar peningkatan Indeks Kebugaran Masyarakat dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Tantangan Peningkatan Indeks Kebugaran Masyarakat

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi capaian kebugaran secara berkelanjutan. Salah satu kendala utama adalah pola aktivitas

olahraga masyarakat yang masih bersifat tidak rutin dan belum menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari. Kegiatan olahraga cenderung dilakukan pada momen tertentu atau dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan event, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kebugaran belum optimal dalam jangka panjang.

Kendala lainnya berkaitan dengan kualitas pelaksanaan aktivitas olahraga masyarakat. Meskipun partisipasi mengalami peningkatan, aktivitas yang dilakukan belum seluruhnya memenuhi prinsip kebugaran, baik dari sisi intensitas, durasi, maupun keteraturan. Minimnya edukasi dan pendampingan mengenai olahraga yang benar dan sesuai dengan kondisi individu menyebabkan peningkatan partisipasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kebugaran yang merata di seluruh kelompok masyarakat.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga yang memadai, khususnya di wilayah tertentu, turut mempengaruhi rendahnya tingkat kebugaran masyarakat. Fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya ramah bagi semua kelompok usia dan kelompok layanan khusus, seperti lansia dan penyandang disabilitas, sehingga partisipasi olahraga yang inklusif dan berkelanjutan masih menghadapi tantangan.

Kendala koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan Indeks Kebugaran Masyarakat. Belum optimalnya sinergi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk dalam penerapan kebijakan olahraga di lingkungan kerja dan ruang publik, menyebabkan upaya peningkatan kebugaran masyarakat belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang dan waktu masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga secara rutin.

Rekomendasi dan Upaya Peningkatan Indeks Kebugaran Masyarakat

1. *Mengarahkan program pembudayaan olahraga pada pembentukan kebiasaan olahraga yang berkelanjutan*
Program disusun agar mendorong aktivitas olahraga yang rutin dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peningkatan kebugaran masyarakat tidak hanya bersifat temporer.
2. *Penguatan kebijakan dan program pembudayaan olahraga*
Diperlukan kerangka kebijakan jangka menengah dan panjang sebagai acuan pelaksanaan program, agar arah pembudayaan olahraga tetap konsisten meskipun terjadi dinamika kebijakan.
3. *Peningkatan integrasi dan sinergi lintas sektor*
Penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan untuk mendorong kebijakan olahraga di lingkungan kerja, pendidikan, dan ruang publik sebagai bagian dari aktivitas rutin masyarakat.

4. *Pengembangan edukasi dan pendampingan olahraga berbasis kelompok sasaran*
Pendekatan edukasi dan pendampingan perlu disesuaikan dengan karakteristik usia, kondisi fisik, dan kebutuhan khusus masyarakat guna meningkatkan kualitas dan keamanan aktivitas olahraga.
5. *Pemanfaatan data kebugaran dalam perencanaan dan evaluasi program*
Data kebugaran masyarakat perlu dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai dasar perbaikan desain program, sehingga intervensi pembudayaan olahraga dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berdampak.

Dalam usaha menaikkan tingkat partisipasi Masyarakat, tahun 2025 telah melakukan berbagai upaya melalui program keolahragaan yang diselenggarakan oleh 4 unit teknis di bawahnya. Perincian atas pelaksanaan beberapa kegiatan keolahragaan tersebut adalah sebagai berikut:

Analisis Perbandingan Indeks Kebugaran Masyarakat dengan Benchmark Internasional

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga menunjukkan bahwa Indeks Kebugaran Masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari 0,196 pada tahun 2024 menjadi 0,347 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi kebugaran masyarakat yang berjalan seiring dengan meningkatnya partisipasi olahraga. Meski demikian, apabila dibandingkan dengan benchmark internasional, capaian tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dicermati secara lebih mendalam.

Sebagai pembanding, Singapura melalui *National Sport and Exercise Participation Survey (NSEPS)* secara konsisten melaporkan tingkat partisipasi olahraga dan aktivitas fisik masyarakat yang relatif tinggi dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode sebelum dan setelah pandemi, proporsi penduduk yang aktif berolahraga atau melakukan aktivitas fisik tercatat berada pada kisaran di atas 70 persen, dan menunjukkan tren pemulihan yang berlanjut hingga periode 2024–2025. Perlu dicatat bahwa Singapura tidak menyajikan kebugaran masyarakat dalam satu indeks komposit seperti IPO, melainkan melalui indikator partisipasi dan perilaku aktif yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan *sport-for-life*.

Sementara itu, *American Fitness Index (AFI)* di Amerika Serikat mengukur kebugaran masyarakat melalui skor komposit berbasis kota dengan skala 0–100, yang mencakup indikator perilaku aktivitas fisik, kondisi kesehatan, lingkungan, dan kebijakan publik. Pada AFI 2024, kota dengan peringkat tertinggi mencatat skor kebugaran sekitar 85,6, sementara pada AFI 2025 terjadi peningkatan kinerja kebugaran secara umum, antara lain ditandai dengan naiknya persentase penduduk yang memenuhi pedoman aktivitas fisik aerobik dari sekitar 50,9 persen pada 2024 menjadi 59,9 persen pada 2025. Pendekatan AFI ini menekankan pengukuran kebugaran sebagai hasil dari sistem dan lingkungan pendukung

yang berjalan secara berkelanjutan.

Berbeda dengan kedua pendekatan tersebut, Indeks Kebugaran Masyarakat Indonesia dalam IPO 2025 merupakan indeks komposit nasional yang secara langsung mengukur tingkat kebugaran masyarakat melalui metodologi terstandar dan seragam di seluruh wilayah. IPO memposisikan kebugaran sebagai salah satu dimensi utama pembangunan olahraga, yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi partisipasi olahraga dan efektivitas program pembudayaan olahraga pada periode tertentu. Perbedaan metodologi ini menyebabkan capaian Indonesia lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan dan intensitas program tahunan, dibandingkan dengan AFI dan NSEPS yang mencerminkan stabilitas sistem jangka panjang.

Dengan demikian, analisis gap menunjukkan bahwa meskipun Indeks Kebugaran Masyarakat Indonesia tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan, capaian tersebut masih berada pada tahap penguatan awal jika dibandingkan dengan benchmark internasional. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan nilai indeks, tetapi juga pada upaya membangun ekosistem kebugaran masyarakat yang berkelanjutan, sehingga capaian kebugaran tidak semata bergantung pada momentum program, melainkan menjadi bagian dari perilaku dan sistem sosial masyarakat secara jangka panjang.

D. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	70	70	70	80	76,5
	Realisasi	67,62	67,41	77,06	76,23	73,16

Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan Amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansi secara berkelanjutan. Cakupan/ruang lingkup implementasi SAKIP yang dievaluasi

adalah:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa kategori penilaian tersebut, SAKIP Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2025 atas pelaksanaan di tahun 2025 adalah sebesar 73,16. Dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

Dinamika Capaian Kinerja Tahun 2025

Penurunan capaian Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) pada Tahun 2025, dari 76,23 pada Tahun 2024 menjadi 73,16, didasarkan pada hasil Berita Acara (BA) Pemeriksaan SAKIP yang mengidentifikasi beberapa catatan perbaikan utama. Salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian adalah belum selarasnya indikator kinerja antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Rencana Strategis (Renstra) Deputy. Perbedaan tersebut khususnya terdapat pada indikator "Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir" pada IKU, sementara dalam Renstra Deputy dirumuskan sebagai "Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga", sehingga dinilai belum sepenuhnya konsisten dalam kerangka perencanaan dan pengukuran kinerja.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa indikator pada Kinerja Kegiatan (KK2) belum bersifat *achievable*, yang tercermin dari adanya kesenjangan antara target dan realisasi. Hal ini terlihat pada indikator Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dengan target sebesar 40 persen namun realisasi baru mencapai 26,3 persen, serta indikator Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia dengan target 30 persen dan realisasi 19,6 persen. Kondisi tersebut berdampak pada penilaian atas kualitas penetapan target dan capaian kinerja.

Faktor lainnya adalah belum optimalnya penjelasan yang lebih rinci terkait relevansi sampling Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dalam mengukur capaian indikator. Penjelasan konkret mengenai proses pengambilan sampel di tingkat desa dan kelurahan yang tersebar di 34 provinsi, khususnya untuk mengukur indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir, dinilai belum sepenuhnya teruraikan secara rinci dalam dokumen laporan kinerja.

Dari sisi pelaporan, organisasi belum menyusun laporan kinerja secara berkala, baik triwulanan maupun semesteran. Laporan kinerja yang masih disusun secara tahunan

berdampak pada penilaian dengan bobot kategori C pada lembar kerja evaluasi SAKIP. Selain itu, dokumen kinerja juga dinilai belum dilengkapi dengan analisis perbandingan capaian pada level internasional, seperti *National Sport and Exercise Participation Survey* (Singapura), *Malaysian Sport Culture Index*, *World Population Review*, dan *Global Health Index*, yang seharusnya dapat memperkuat konteks capaian kinerja nasional.

Catatan evaluasi lainnya adalah belum optimalnya penyajian informasi mengenai upaya perbaikan ke depan untuk setiap indikator kinerja, serta belum sepenuhnya ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya. Selain itu, mekanisme monitoring atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP juga belum berjalan secara sistematis, sehingga mempengaruhi penilaian terhadap komitmen perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP.

Analisis Capaian dan Tindak Lanjut PM SAKIP

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi PM SAKIP Tahun 2025, perbaikan sistem akuntabilitas kinerja akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi transisi perencanaan yang sedang berlangsung. Pada tahun berjalan, Renstra Kementerian dan Renstra Deputi belum ditetapkan, sehingga penyelarasan indikator kinerja secara menyeluruh belum dapat dilaksanakan secara optimal. Meskipun demikian, indikator kinerja yang digunakan telah mengacu pada Perjanjian Kinerja serta selaras dengan draft Renstra yang sedang dalam proses penyusunan, sehingga secara substansi telah mencerminkan arah kebijakan dan sasaran kinerja organisasi ke depan.

Terkait pelaporan kinerja, monitoring realisasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala melalui pengisian capaian triwulanan pada aplikasi perencanaan dan penganggaran, seperti sistem Bappenas dan e-Kinerja Kemenpora. Namun demikian, mekanisme tersebut belum sepenuhnya dituangkan dalam bentuk dokumen laporan kinerja triwulanan atau semesteran. Ke depan, setelah dokumen perencanaan strategis ditetapkan, penyusunan laporan kinerja berkala akan diupayakan sebagai bagian dari penguatan siklus manajemen kinerja dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Selain itu, perbaikan kualitas pengukuran kinerja akan diarahkan pada penyempurnaan penjelasan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dan penguatan analisis capaian indikator dengan membandingkan kondisi nasional terhadap praktik dan capaian di tingkat internasional. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara bertahap disertai dengan mekanisme monitoring yang lebih terstruktur guna mendorong peningkatan nilai dan kualitas penerapan SAKIP pada periode berikutnya dan telah dituangkan pada Laporan Kinerja tahun 2025.

Tindak Lanjut atas Capaian Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi PM SAKIP tersebut, ke depan akan dilakukan penyelarasan indikator kinerja antara IKU dan Renstra Deputi agar lebih konsisten dan terintegrasi. Selain itu, penetapan target kinerja akan disempurnakan dengan

mempertimbangkan capaian historis, kapasitas program, serta kondisi objektif di lapangan sehingga indikator yang ditetapkan lebih realistis dan *achievable*. Penguatan aspek pengukuran kinerja juga akan dilakukan melalui penyempurnaan penjelasan teknis pengambilan dan validasi data IPO, termasuk cakupan dan sebaran sampling di tingkat desa dan kelurahan.

Di samping itu, penyusunan laporan kinerja berkala akan mulai diimplementasikan sebagai bagian dari penguatan siklus manajemen kinerja, disertai dengan pemanfaatan hasil evaluasi secara lebih optimal dalam perbaikan program. Dokumen kinerja juga akan dilengkapi dengan analisis perbandingan capaian pada tingkat internasional sebagai pembanding dan pengayaan perspektif. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP akan ditindaklanjuti secara bertahap dan disertai mekanisme monitoring yang lebih terstruktur untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan SAKIP dan akuntabilitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

E. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	85	86	87	88	83,5
	Realisasi	89,07	89,20	73,65	83,40	81,78

Terkelolanya anggaran yang optimal dan akuntabel diukur menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator tersebut antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output. Dispen SPM merupakan pengurang dari nilai total IKPA tahun 2025.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	53.80	63.18	100.00	100.00	60.71	100.00	81.78	100%	0.00	81.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.07	12.64	10.00	10.00	6.07	25.00				
					Nilai Aspek	75.90			80.97			100.00				

Berdasarkan capaian tersebut, penilaian kinerja tidak mencapai target secara maksimal dimana target nilai 83,5 namun sampai dengan 31 Desember 2025 hanya memperoleh nilai 81,78. IKPA pada bulan September tahun 2024 namun sayangnya perubahan tersebut tidak diakomodir pada perjanjian kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga. Pada gambar di atas bisa terlihat beberapa indikator yang dinilai rendah. Berikut adalah rincian faktor berdasarkan masing-masing indikator:

a. Deviasi Halaman III DIPA

- Adanya kesalahan dalam memperkirakan jumlah dana yang akan diambil setiap bulannya;
- Pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak kepada pergeseran waktu pencairan dana.

b. Penyerapan Anggaran

- Realisasi penyerapan anggaran berbeda jauh dengan target penyerapan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan target 15% pada Triwulan I, 50% pada Triwulan II/Semester I, 70% pada Triwulan III, dan 90% pada Triwulan IV/Semester II;
- Pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak kepada pergeseran waktu pencairan dana;
- Adanya pagu blokir;
- Adanya perombakan SOTK sehingga berpengaruh terhadap program kerja secara keseluruhan.

c. Pengelolaan UP dan TUP

- Keterlambatan penyusunan dokumen pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keterlambatan pengajuan dokumen pencairan untuk dikoreksi terlebih dahulu oleh PPSPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Dispensasi SPM

- Pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak kepada pergeseran waktu pencairan dana;
- Adanya DIPA pembukaan blokir anggaran perjalanan dinas pada akhir periode anggaran sehingga pencairan dana hanya bisa dilakukan setelah masa pengiriman SPM Non-LS selesai.

Dari perincian atas permasalahan di atas maka akan dilakukan langkah untuk antisipasi dan peningkatan nilai IKPA pada tahun 2025 sebagai berikut:

a. Deviasi Halaman III DIPA

- Peningkatan akurasi perkiraan penarikan dana yang akan diambil dengan lebih memperhatikan perkiraan jadwal pelaksanaan dan antisipasi atas perubahan jadwal tersebut.

b. Penyerapan Anggaran

- *Mapping* jadwal kegiatan dan antisipasi berubahnya jadwal kegiatan;
- Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan dimulai sejak awal tahun;
- Segera melengkapi kebutuhan data dukung untuk pengusulan pembukaan buka blokir di awal tahun 2025 sehingga kegiatan yang terblokir anggarannya bisa segera dilaksanakan

c. Pengelolaan UP dan TUP

- Peningkatan komitmen pada masing-masing PPK dan BPP beserta staf pengelola keuangan pada masing-masing UKE II untuk memperbaiki sistem kerja penyusunan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk pencairan.

F. Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	N/A	N/A	N/A	N/A	3
	Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5

Barang Milik Negara yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau

berasal dari perolehan lain yang sah. Dalam rangka pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan barang milik negara instansi pemerintah termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya pada satker Pengembangan Pemuda diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara per semester yang didalamnya mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Indeks Pengelolaan Aset mengukur kualitas kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi pengelolaan, kepatuhan, pengawasan, dan pengendalian serta keandalan administrasi BMN pada Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang. IPA Satuan Kerja pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga merujuk pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025.

Salah satu kewajiban pengguna anggaran pada akhir tahun anggaran adalah melaporkan penggunaan anggaran pada satu periode atau satu tahun anggaran yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja organisasi. Penatausahaan laporan keuangan meliputi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Dalam hal penilaian kinerja pemerintahan salah satu unsur berhasil atau tidaknya suatu organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mengelola, mencatat, memanfaatkan barang milik Negara yang menjadi bagian dari organisasi dimaksud.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan barang milik Negara dapat dilihat pada Pasal 1 butir 10 yang menyebutkan: "semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan pengertian barang menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah setiap benda baik yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Kendala dan Tindak Lanjut

Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara/Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025 adalah

- Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, yaitu tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP dan LKKL terkait BMN. Satker Bidang Pembudayaan Olahraga, melalui Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah mengikuti rekomendasi BPK atas pengelolaan Aset di Lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- Kepatuhan Pengelolaan BMN Terhadap Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN. Satker Bidang Pembudayaan Olahraga melalui Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah menerbitkan SK UAKPB dan SK Tim Keuangan yang akan

- menangani Barang Milik Negara di Lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
- Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif yang berkaitan pada tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN serta tindak lanjut BMN rusak berat. Masih minimnya pengetahuan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mengenai Barang Milik Negara. Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga akan mengeluarkan ST Penanggungjawab Barang untuk setiap unit kerja;
- Administrasi BMN yang Andal yaitu penggunaan BMN sesuai ketentuan. Seluruh Aset pelimpahan dari Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga telah ditetapkan status penggunaannya melalui SK Status Penggunaan.

G. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	88	89	90	91	80
	Realisasi	86,53	87,80	96,85	76,48	83,39

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas (proving) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas (improving) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi pendukung dan kendala atas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker).

Nilai atas Kinerja Anggaran tersedia dan bisa diakses pada website E-SMART DJA. Nilai atas Kinerja Anggaran terdiri dari 2 komponen penilaian utama yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memiliki 2

komponen penilaian, yaitu efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran. Efektivitas perencanaan anggaran merupakan nilai atas capaian rincian output sedangkan efisiensi perencanaan adalah nilai atas pelaksanaan dengan bobot nilai 10% dan efisiensi atas penggunaan SBK (Satuan Biaya Keluaran) dengan bobot nilai 15%. Sedangkan untuk Nilai Pelaksanaan Anggaran didapatkan dari nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang ada pada website OM SPAN.

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 83,39 dari target sebesar 91. Perincian atas penilaian tersebut dirincikan pada gambar di bawah ini:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	092.01.411139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLARHAGA KEMENPOK	85,00	81,78	83,39

Kendala dalam Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran

Kendala yang dihadapi untuk Pencapaian Kinerja selama tahun 2025 adalah mayoritas jadwal kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga realisasi output menumpuk di akhir tahun. Hal ini terjadi karena adanya kendala pada bagian anggaran seperti masih adanya pagu blokir akibat kurangnya data dukung seperti TOR dan Juknis Kegiatan/Bantuan, perubahan SOTK baru di Kementerian Pemuda dan Olahraga, pergantian pejabat pengelola keuangan, perubahan SOTK Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan adanya jadwal kegiatan yang diundur/terhambat akibat perubahan program dan kebijakan.

Tindak Lanjut atas Kendala Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran

Ujung tombak dari pelaksanaan kinerja anggaran adalah akurasi dan kematangan dalam perencanaan. Oleh karena itu, seluruh UKE II diharapkan bisa merencanakan, menjadwalkan, mengantisipasi pelaksanaan kegiatan dengan baik dan tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran juga memuat komponen penilaian atas penerapan SBK (Standar Biaya Keluaran) sehingga diharapkan UKE II bisa mengajukan penyusunan SBK untuk kegiatan yang berulang setiap tahun.

H. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	86	88	90	92	89,2
	Realisasi	92,28%	90,49	86,32	89,04	91,12

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Pelaksanaan SKM menggunakan aplikasi e-skm dan manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

Tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat adalah:

1. Mengetahui tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
2. Menilai unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dari Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.
3. Mendorong setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja pelayanan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.

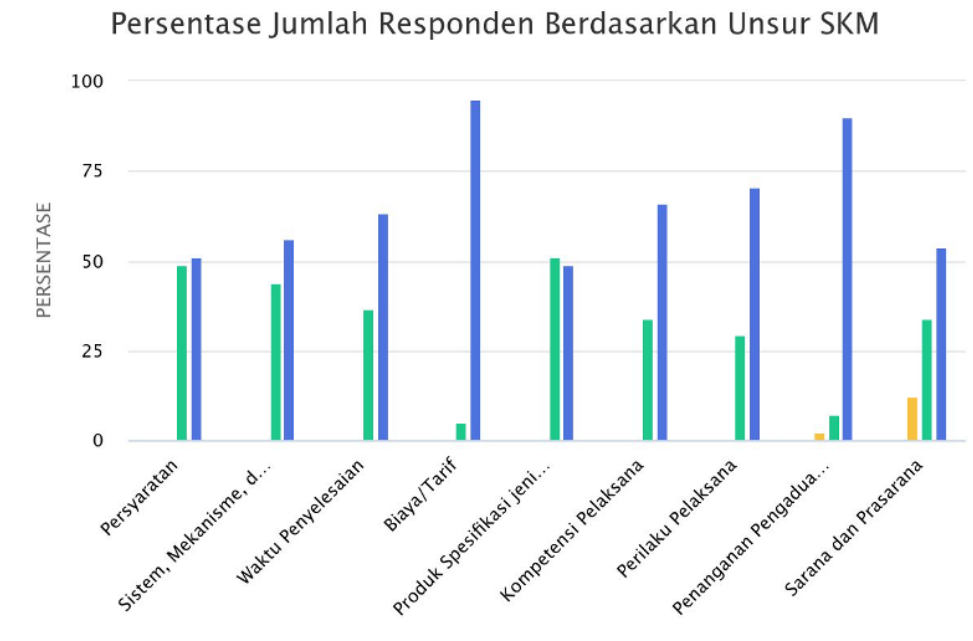
Pelaksanaan survei dilakukan selama tahun 2025 dengan melibatkan responden secara langsung maupun melalui media daring. Tingkat partisipasi responden mencapai 140 orang, atau sekitar 58,3% dari target populasi, sehingga data yang diperoleh dinilai cukup

representatif untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat. Tahapan pelaksanaan SKM diawali dengan pembuatan aplikasi kuesioner yang dilakukan oleh Bagian Sisinfo Kemenpora. Selanjutnya dilakukan pengisian kuesioner, tabulasi dan perhitungan serta analisis dan laporan. Proses pengisian kuesioner hingga analisis dan pelaporan dapat dilakukan oleh unit eselon II. Pengisian kuesioner dilakukan secara online melalui aplikasi <https://skm.kemenpora.go.id/>. Responden bisa melakukan pengisian melalui PC atau perangkat elektronik pribadi. Hasil dari kuesioner yang berupa *data entry* kemudian diolah dengan program komputer/sistem database sehingga didapatkan perhitungan indeks. Dalam beberapa kegiatan, pelaksanaan survei juga dilakukan secara manual karena pada saat tersebut dinilai lebih efisien. Setelah responden mengisi formulir manual kemudian diinput di aplikasi e-skm oleh petugas. Berdasarkan Nilai IKM setiap unsur sebagai berikut:

#	Unsur SKM	Nilai IKM	Nilai IKM (Dikonversi)	Mutu	Kinerja
1	Persyaratan	3.51	87.8	B	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.56	89.02	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	3.63	90.85	A	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3.95	98.78	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3.49	87.2	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.66	91.46	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.71	92.68	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.88	96.95	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3.41	85.37	B	Baik

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

- Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3.41 Selanjutnya produk, spesifikasi dan jenis layanan mendapatkan nilai 3.49 adalah nilai terendah kedua. Persyaratan menjadi unsur terendah ketiga dengan nilai 3.51.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif 3.95. Nilai tertinggi berikutnya adalah Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3.88 dan perilaku pelaksana dengan nilai 3.71.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut.



Evaluasi dengan melihat hasil IKM dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Tim yang bertanggung jawab terhadap SKM menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan selama 12 bulan (satu tahun ke depan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut (halaman selanjutnya):

Tabel tindak lanjut perbaikan hasil SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Memberikan masukan kepada unit-unit pelaksana untuk tepat waktu dalam memberikan pelayanan/ melaksanakan kegiatan	√				Tim Humas
		Melakukan monitoring dan evaluasi agar unit-unit pelaksana tepat waktu dalam memberikan pelayanan/ melaksanakan kegiatan		√	√	√	Tim Eselon Terkait
2	Produk, spesifikasi dan jenis layanan yang diberikan	Mendata ketersediaan dan kecocokan Standar Pelayanan dan SOP dengan jenis Pelayanan yang diberikan	√				Tim SDM dan Organisasi
3	Sistem, Mekanisme, Prosedur dan Layanan	Melakukan review dan penyusunan SP dan SOP Pelayanan	√				Tim SDM dan Organisasi
		Monitoring dan Evaluasi Pemberian layanan sesuai SP dan SOP		√	√	√	Tim SDM dan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari Januari hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang SANGAT BAIK dengan nilai SKM 91,12. Nilai SKM ini menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun sebelumnya (2024) .
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Penyelesaian, Produk, spesifikasi dan jenis layanan yang diberikan serta Sistem, Mekanisme, Prosedur dan Layanan
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai penanganan, pengaduan, saran dan masukan; biaya/tarif dan perilaku pelaksana.

I. Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	67	68	72	75	76,5
	Realisasi	57,58	64,86	72,12	78,31	67,94

Berikut hasil akhir dari Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga :

<i>SUBASPEK</i>	SESDEP	ORMA	ORDIK	OLK
<i>ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS</i>				
1.1. PENCIPTAAN ARSIP	14.00	10.79	12.39	7.00
1.2. PENGGUNAAN ARSIP	14.00	14.00	14.00	10.50
1.3. PEMELIHARAAN ARSIP	20.93	17.36	19.32	17.97
1.4. PENYUSUTAN ARSIP	10.50	7.88	0.00	0.00
ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1. SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	6.75	5.25	6.75	2.50
2.2. PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	15.00	15.00	15.00	15.00
GRAND TOTAL	81.20	70.20	67.40	52.97
NILAI RATA - RATA	67.94			

Berikut hasil penilaian LAKI sebelum penyesuaian bobot pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga:

Tabel penilaian sebelum penyesuaian beban

	SESDEP		ORMA		ORDIK		OLK	
SUBASPEK	MAX	NILAI	MAX	NILAI	MAX	NILAI	MAX	NILAI
1.1. PENCIPTAAN ARSIP	700	700	700	540	700	620	700	350
1.2. PENGGUNAAN ARSIP	200	200	200	200	200	200	200	150
1.3. PEMELIHARAAN ARSIP	900	770	1100	780	1100	710	900	660
1.4. PENYUSUTAN ARSIP	200	120	200	90	200	0	200	0
2.1. SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	200	90	200	70	200	90	300	50
2.2. PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	100	100	100	100	100	100	100	100
Grand Total	2300	1980	2500	1780	2500	1720	2400	1310

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki kekurangan dalam kearsipan terutama terhadap sub-aspek penciptaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, dan sumber daya manusia kearsipan. Berikut hasil identifikasi masalah berdasarkan hasil penelusuran tim kami:

1. Penciptaan Arsip

Penciptaan arsip terbagi menjadi 2 kejadian yaitu penciptaan elektronik dan konvensional. Penciptaan arsip elektronik sudah di otomatisasi pengelolaannya dengan adanya sistem Srikandi, Namun demikian masih ada sebagian pegawai yang belum membudayakan komunikasi melalui sistem tersebut. Hal itu membuat ada beberapa komunikasi surat yang belum ditindaklanjuti. Penciptaan arsip konvensional sudah dilakukan di masing-masing unit namun dokumentasi dan bukti yang dikumpulkan belum lengkap.

2. Pemeliharaan Arsip

Catatan atas pemeliharaan Arsip pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ada pada dua hal yaitu pemberkasan arsip aktif dan alih media arsip. Unit-unit belum memiliki pegawai yang bersertifikasi yang bisa mengelola mandiri operasional pemberkasan dan alih media arsip. Akibatnya tidak dilakukan identifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan pelaksanaan atas pekerjaan tersebut. Hal tersebut membuat banyak berkas belum diarsipkan secara memadai dan proses alih media lambat.

3. Penyusutan Arsip

Arsip belum bisa disusutkan dikarenakan masih banyak arsip yang belum tersusun rapi. Arsip tersebut harus diorganisir terlebih dahulu sebelum bisa disusutkan sebagaimana mestinya.

4. Sumber Daya Manusia Kearsipan

Belum adanya pegawai yang memiliki sertifikasi kearsipan dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia).

Berikut beberapa hal yang bisa kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diidentifikasi di atas:

- Menekankan penggunaan Srikandi dalam budaya komunikasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- Mengumpulkan data yang diperlukan sebelum dilaksanakannya penilaian dari unit kearsipan;
- Mengusulkan pelatihan kearsipan untuk pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

J. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	70%	70%	70%	70%	82%
	Realisasi	50%	100%	100%	100%	91,67%

Dokumen LHP BPK merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan lembaga pemerintahan yang dilakukan BPK setelah tahun anggaran selesai dilaksanakan. Hasil dari dokumen tersebut menyajikan 3 hal, yaitu opini audit, temuan audit, dan kesimpulan atau rekomendasi BPK RI. Secara kewenangan, LHP dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persentase penyelesaian temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah indikator kinerja berdasarkan jumlah rekomendasi yang dituntaskan dari hasil audit BPK/APIP dibandingkan dengan jumlah seluruh temuan dari 3 tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah menyelesaikan 22 dari 24 rekomendasi BPK untuk temuan 2021 s.d 2023. Adapun rekomendasi yang disarankan oleh BPK terdapat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Agar temuan pemeriksaan tidak berulang lagi, maka:

- KPA akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pertanggungjawaban belanja;
- PPSPM, PPK, BP, dan BPP agar mempedomani ketentuan yang berlaku dan lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban belanja.

K. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pelaksanaan	Target	N/A	N/A	N/A	N/A	75%

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	104%
--	-----------	-----	-----	-----	-----	------

Reformasi Birokrasi Tematik "*Digitalisasi Administrasi Pemerintahan pada Sektor Kesehatan*"

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema *Digitalisasi Administrasi Pemerintahan pada Sektor Kesehatan* diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam mendukung layanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transformasi digital menjadi instrumen strategis dalam mempercepat proses bisnis, meningkatkan keterpaduan data, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Memperkuat peran Kemenpora dalam pendekatan promotif dan preventif berbasis komunitas dengan dukungan teknologi melalui penggerak gaya hidup sehat, edukasi kesehatan digital, dan literasi pemuda terhadap sistem kesehatan yang modern Tambah Indikator Edit Sasaran Tematik Hapus Sasaran Tematik	Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat	23	Indeks	24	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Asdep Olahraga Pendidikan, Asdep Olahraga Masyarakat, Asdep Olahraga Layanan Khusus	104%	Dengan penerapan edukasi kesehatan digital melalui platform media sosial, aplikasi kebugaran, dan konten edukatif berbasis data. Kemenpora mendorong pemanfaatan teknologi untuk pengukuran kebugaran sederhana, pelacakan aktivitas harian, serta kampanye literasi kebugaran yang mudah diakses pemuda. Digitalisasi edukasi kesehatan ini terbukti meningkatkan pengetahuan pemuda tentang pentingnya aktivitas fisik, kontrol berat badan, kesehatan mental, pola makan seimbang, serta risiko kesehatan akibat kurang gerak. Hal ini diperkuat fasilitasi Kemenpora dalam ekosistem komunitas olahraga sebagai ujung tombak gerakan hidup sehat, termasuk melalui festival dan kampanye olahraga. Peningkatan partisipasi komunitas ini berkontribusi pada meningkatnya frekuensi aktivitas fisik pemuda yang berfungsi mencegah risiko penyakit tidak menular (PTM), meningkatkan kebugaran kardiorespirasi, dan mengurangi sedentary lifestyle.
--------------------------------------	---	-------------------------------------	----	--------	----	--	------	--

Sebagai bentuk implementasi, unit kerja telah melakukan digitalisasi proses administrasi pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan program/kegiatan sektor kesehatan melalui pemanfaatan sistem informasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut diukur melalui indikator capaian yang mencerminkan kinerja output dan outcome yang tertuang dalam dokumen rencana aksi sebagai berikut:

Tema	Sasaran	Indikator Permasalahan	Rencana Aksi
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan - Sektor Kesehatan	Menciptakan birokrasi yang lebih tangkas dalam pelayanan publik yang lebih digital dalam bidang olahraga pendidikan	Tingkat kebugaran Peserta didik informal dan nonformal yang terfasilitasi dalam identifikasi calon bibit talenta olahraga	Pengukuran tes kebugaran Peserta didik informal dan nonformal dalam identifikasi calon bibit talenta olahraga

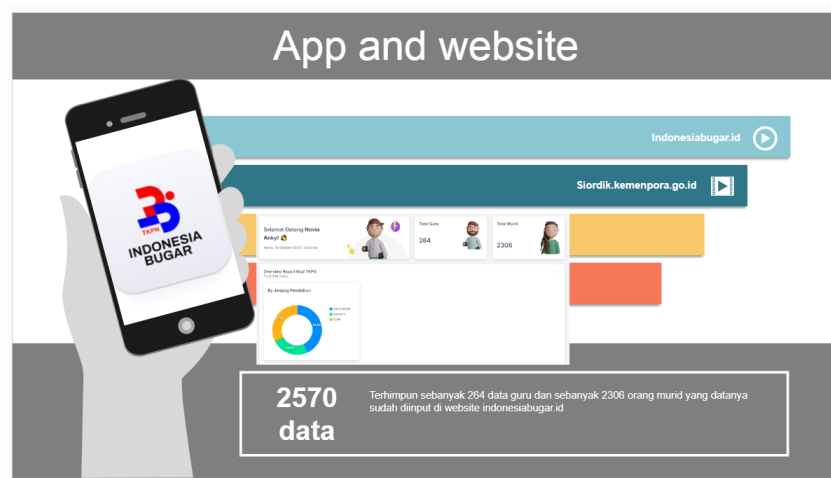
	dengan aspek pengelolaan data peserta didik dalam identifikasi calon bibit talenta olahraga		
	Pemasalan olahraga dengan memanfaatkan sosial media, ruang publik dalam meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat dan olahraga layanan khusus dengan Kampanye "Ayo Olahraga"	Peserta Kampanye Olahraga Masyarakat	Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga terkait dimensi kebugaran dan partisipasi masyarakat berolahraga melalui kegiatan festival olahraga masyarakat dan Pengukuran melalui aplikasi SIPGAR, Indofit
		Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus	Digitalisasi peserta kampanye peningkatan partisipasi berolahraga dan kebugaran jasmani pada Olahraga Layanan Khusus

Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Unit / Satuan Kerja Pelaksana	Kolaborasi/Kerjasama bersama stakeholders
	Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total				
Pengukuran tes kebugaran Peserta didik informal dan nonformal dalam identifikasi calon bibit talenta olahraga	Jumlah peserta didik tes kebugaran pelajar nusantara (TKPN) yang terintegrasi dalam aplikasi SIORDIK dan Indonesia Bugar	Orang	-	-	721	309	1030	Rp. 1.059.270000	Teknologi dan Informasi	Asiten Deputi Olahraga Pendidikan	Tim Pakar dari beberapa perguruan tinggi serta beberapa guru olahraga pada daerah yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan TKPN (Tes Kebugaran Pelajar Nusantara)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, Unit Olahraga Pendidikan telah mengimplementasikan digitalisasi administrasi dan pengelolaan kinerja melalui pemanfaatan **aplikasi TKPN**. Aplikasi ini digunakan sebagai sarana pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data kegiatan olahraga pendidikan secara terintegrasi dan berbasis digital.

Pemanfaatan aplikasi TKPN memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan data program dan kegiatan olahraga pendidikan. Melalui aplikasi ini, proses penginputan, verifikasi, dan

pelaporan data kinerja dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi ketergantungan pada proses manual.



Capaian utama yang diperoleh dari penggunaan aplikasi TKPN antara lain meningkatnya keterpaduan data kegiatan olahraga pendidikan, meningkatnya ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja, serta tersedianya data yang lebih valid sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi program. Selain itu, pemanfaatan aplikasi TKPN turut mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, penggunaan aplikasi TKPN oleh Unit Olahraga Pendidikan merupakan wujud konkret pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik melalui digitalisasi administrasi pemerintahan, yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan program serta mendukung pencapaian kinerja sektor olahraga pendidikan secara berkelanjutan.

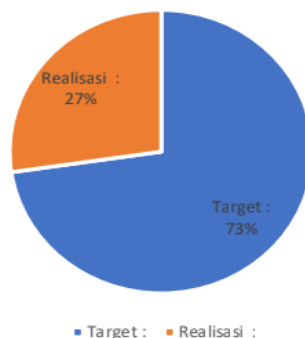
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (PK 2025)	TARGET 2025	INDIKATOR KEGIATAN	Rencana Aksi	Indikator Output		TARGET				Anggaran	Pelaksana
				JUMLAH	Target Output	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8.700 Orang	Meningkatnya persentase Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	Melaksanakan kampanye olahraga layanan khusus yang mendukung inklusivitas yang berasal dari penyandang disabilitas, lansia, warga binaan, dan anak jalanan. Kegiatan ini terdiri dari bimbingan teknis dan festival olahraga layanan khusus terdiri dari festival olahraga lansia, festival olahraga disabilitas, festival olahraga warga binaan, dan festival olahraga anak jalanan.	8700	orang	0	0	3270	5430	Rp12.074.000.000	Tim Kerja Asdep OLK

Unit Olahraga Layanan Khusus telah mencapai kemajuan signifikan dalam mendukung Reformasi Birokrasi Tematik melalui pengembangan dan pemanfaatan **database Kampanye Olahraga Layanan Khusus** sebagai sarana digitalisasi administrasi dan pengelolaan program. Database tersebut digunakan untuk menghimpun, mengelola, dan memutakhirkan data sasaran kampanye, pelaksanaan kegiatan, serta capaian program olahraga layanan khusus secara terstruktur dan terdokumentasi.

Database pada Kampanye Olahraga Layanan Khusus

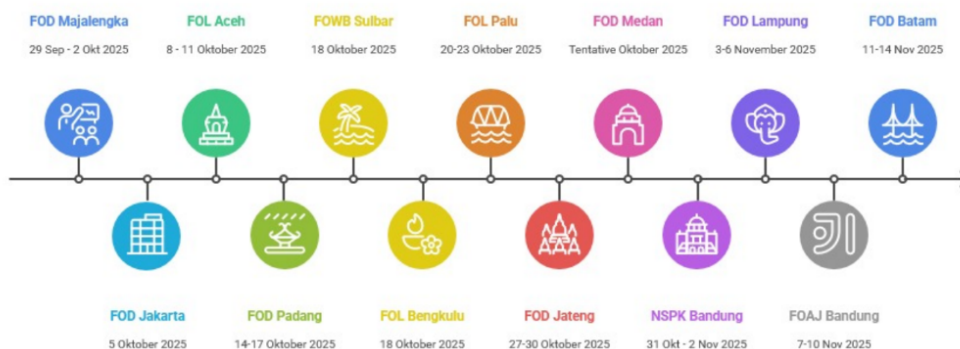
Pembuatan database dari pelaksanaan kampanye olahraga berasal dari penyandang disabilitas, lansia, warga binaan, dan anak jalanan dengan presentase demografi jumlah peserta.

Kampanye Olahraga Olahraga Layanan Khusus



Pemanfaatan database ini telah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kampanye olahraga layanan khusus, ditandai dengan tersedianya data sasaran yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan terkait. Selain itu, database mendukung proses monitoring dan evaluasi kegiatan secara lebih efektif, sehingga pelaporan kinerja dapat disusun secara tepat waktu dan berbasis data.

Time Line Kegiatan Asdep Olahraga Layanan Khusus



Dari sisi hasil, penerapan database Kampanye Olahraga Layanan Khusus berkontribusi pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan kampanye, memperluas jangkauan sasaran layanan, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program. Digitalisasi pengelolaan data ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam pengembangan olahraga layanan khusus.

Rencana Tindak Lanjut



TABEL RENCANA AKSI												
Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Kolaborasi / Kerjasama bersama stakeholders
	Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga terkait dimensi kebugaran dan partisipasi masyarakat berolahraga melalui kegiatan festival olahraga masyarakat	Jumlah Provinsi, dan/atau Kab/Kota yang melakukan pengukuran IPO pada Festival Olahraga Masyarakat	Kab/Kota			72	100	172	2.500.000.000	SDM	Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov/Kab

Pengambilan data **Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)** merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan **Reformasi Birokrasi (RB) Tematik**, khususnya pada tema peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia. IPO berfungsi sebagai alat ukur berbasis data yang menggambarkan kondisi pembangunan olahraga secara komprehensif, meliputi dimensi partisipasi masyarakat, kebugaran jasmani, ruang terbuka olahraga, dan sumber daya manusia keolahragaan.

Melalui pengumpulan data IPO yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan, instansi pemerintah memperoleh dasar objektif dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi kinerja pembangunan olahraga. Hal ini sejalan dengan arah RB Tematik yang menekankan **pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy)** serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Data IPO juga berperan penting dalam mendorong **sinergi lintas sektor dan lintas daerah**, karena hasil pengukuran dapat digunakan sebagai referensi bersama antara pemerintah

pusat dan daerah dalam menyusun intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, pengambilan data IPO tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan olahraga, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor olahraga terhadap pencapaian tujuan RB Tematik, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan produktivitas nasional.

Selain itu, pemanfaatan data IPO yang terdigitalisasi turut mendukung agenda **transformasi digital birokrasi**, mempercepat proses pengolahan data, meningkatkan transparansi, serta memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, pengambilan dan pemanfaatan data Indeks Pembangunan Olahraga menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak nyata dan berorientasi pada hasil.



Pelaksanaan kegiatan pengambilan data **Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)** dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah. Kegiatan diawali dengan penyusunan desain pengumpulan data, penetapan indikator dan variabel pengukuran sesuai standar IPO, serta penyusunan pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan di lapangan.

Selanjutnya, dilakukan **koordinasi dan sosialisasi** kepada pemerintah daerah dan petugas pengumpul data guna memastikan kesamaan pemahaman terhadap metodologi, instrumen, dan mekanisme pelaporan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode survei, observasi, dan kompilasi data administrasi yang mencakup dimensi partisipasi olahraga, kebugaran jasmani, ketersediaan sarana prasarana olahraga, serta sumber daya manusia keolahragaan.

Dalam mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, pelaksanaan pengambilan data IPO memanfaatkan **sistem berbasis digital** untuk proses input, pengolahan, dan validasi data. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi data, sekaligus mempercepat proses analisis dan penyajian hasil. Validasi dan verifikasi data dilakukan secara berjenjang untuk menjamin kualitas dan keandalan data yang dihasilkan.

Hasil pengambilan data IPO kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan sebagai dasar evaluasi pembangunan olahraga dan bahan perumusan kebijakan. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus memperkuat kontribusi sektor olahraga dalam pencapaian tujuan **Reformasi Birokrasi Tematik** yang berorientasi pada dampak dan hasil nyata bagi masyarakat.

HAMBATAN

- Proses Administrasi BPS Lama Keterlambatan Anggaran Efisiensi Anggaran Pengumpulan data tertunda sampai Rekomendasi Statistik (Romantik) keluar.
- Keterlambatan Anggaran Efisiensi Anggaran Pengumpulan data tertunda sampai Rekomendasi Statistik (Romantik) Keluar. Anggaran baru cair Juli sedangkan waktu pelaksanaan singkat, data se-Indonesia.
- Efisiensi Anggaran Pengukuran pembangunan keolahragaan tidak mencakup semua 9 dimensi.



3. Pemantauan Kegiatan Tematik GERMAS

GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat. Program ini memiliki beberapa fokus seperti membangun akses untuk memenuhi kebutuhan air minum, instalasi kesehatan masyarakat serta pembangunan pemukiman yang layak huni. Ketiganya merupakan



infrastruktur dasar yang menjadi pondasi dari gerakan masyarakat hidup sehat (*kemkes.go.id*).

Salah satu langkah GERMAS yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan melalui website <https://ayosehat.kemkes.go.id/germas> adalah "Melakukan Aktivitas Fisik". Langkah ini merupakan bagian penting dari pembiasaan pola hidup sehat dalam masyarakat guna mencegah berbagai masalah kesehatan yang beresiko dialami oleh masyarakat Indonesia. Perilaku kehidupan

modern seringkali membuat banyak orang abai dalam melakukan aktivitas fisik; baik itu aktivitas fisik karena bekerja maupun berolahraga. Kemudahan dalam kehidupan sehari-hari karena bantuan teknologi dan minimnya waktu karena banyaknya kesibukan telah menjadikan banyak orang menjalani gaya hidup yang kurang sehat. Oleh karena itu, bagian *germas* aktivitas fisik merupakan salah satu gerakan yang diutamakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang.

Peran Kemenpora dalam Mendukung GERMAS melalui Peningkatan Partisipasi Olahraga

Sinergi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan *Gerakan Masyarakat Hidup Sehat* (GERMAS) tercermin melalui penguatan budaya aktivitas fisik dan olahraga sebagai bagian dari perilaku hidup sehat masyarakat. Kemenpora berperan mendukung implementasi GERMAS melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, termasuk penguatan pembudayaan olahraga yang telah dirancang secara berkelanjutan dalam Rencana Strategis 2025–2029. Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan keterlibatan masyarakat terhadap aktivitas fisik yang terstruktur dan berkesinambungan.

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga memasukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga sebagai fokus utama dalam program kerja dan kegiatannya. Hal ini menjadi bukti komitmen aktif Deputi dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), khususnya melalui penguatan budaya aktivitas fisik di masyarakat. Implementasi komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis yang secara langsung mendorong keterlibatan masyarakat, antara lain penyelenggaraan TARKAM, Festival Olahraga Daerah (FOD), Festival Olahraga Pendidikan (FOP), senam kebugaran, serta pelatihan pada bidang olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga layanan khusus.

Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai agenda program, tetapi menjadi instrumen nyata dalam membangun kebiasaan berolahraga secara berkelanjutan. Dampak kontribusi kegiatan terhadap dukungan GERMAS dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan tingkat kebugaran

masyarakat, serta indikator program lainnya yang dijabarkan lebih lanjut dalam laporan kinerja ini.

4. Realisasi Anggaran *[Our use of budget]*

Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2025 sebesar Rp80.000.000.000. Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, realisasi anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga sebesar Rp79.346.320.552 atau sebesar 99,18% dari anggaran. Detail realisasi pada setiap unit kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
	Program Keolahragaan			
1	Asisten Deputi Bidang Olahraga Layanan Khusus	13.000.000.000	12.953.005.870	99,64%
2	Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan	27.000.000.000	26.593.818.080	98,50%
3	Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat	30.000.000.000	29.837.794.978	99,46%
4	Asisten Deputi Bidang Tenaga dan Organisasi Olahraga Pendidikan	5.300.000.000	5.288.760.000	99,76%
	Program Dukungan Manajemen			
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	4.700.000.000	4.672.941.624	99,42%
	JUMLAH KESELURUHAN	80.000.000.000	79.346.320.552	99,18%

5. Analisis Efisiensi Sumber Daya *[Our analysis on resources efficiency]*

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit

namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output sama/lebih besar, atau persentase input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan.

A. Efisiensi Penggunaan Anggaran [Analysis on budget use efficiency]

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus alat pengendalian bagi suatu Kementerian. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal.

Efisiensi anggaran mengacu pada kemampuan untuk menggunakan anggaran secara optimal sehingga menghasilkan output yang maksimal dengan anggaran (input) yang diberikan. Nilai efisiensi anggaran dihitung dari besaran persentase realisasi anggaran dibagi oleh persentase capaian kinerja. Adapun rumusan perhitungan efisiensi anggaran yang digunakan yaitu:

$$efisiensi = \frac{input}{output} = \frac{\%RA}{\%CRO}$$

Keterangan :

- Efisiensi > 1 (Kurang Efisien) = Belum dapat mencapai kinerja yang diharapkan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- Efisiensi < 1 (Efisien) = Besarnya capaian kinerja melebihi dari anggaran yang dialokasikan.

Hasil penghitungan efisiensi anggaran menunjukkan masih terdapat beberapa indikator kinerja yang berada pada kategori tidak atau kurang efisien, antara lain Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP, Nilai IKPA, Nilai Kinerja Anggaran, serta Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Kondisi tersebut sejalan dengan fakta bahwa capaian kinerja pada indikator-indikator tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun berjalan. Nilai efisiensi yang kurang optimal merupakan konsekuensi

dari perbandingan antara tingkat realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang belum maksimal. Hal ini tidak serta-merta mencerminkan inefisiensi penggunaan anggaran, melainkan menunjukkan adanya gap antara perencanaan target dan realisasi kinerja, khususnya pada indikator yang bersifat *outcome* jangka menengah dan indikator tata kelola yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal di luar kendali langsung pelaksanaan program. Perincian atas penghitungan nilai efisiensi masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (%RA)	Realisasi Kinerja (%CRO)	E= %RA / %CRO	Kategori
1	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir	25.100.000.000	24.902.999.636	0,9098	1,0905	Kurang Efisien
2	Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	25.100.000.000	24.902.999.636	1,5087	0,6576	Efisien
3	Persentase Provinsi yang Menyelenggarakan Kampanye Olahraga	25.100.000.000	24.902.999.636	1,0000	0,9922	Efisien
4	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	72.615.000	0,9926	0,9563	1,0379	Kurang Efisien
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	479.419.000	0,9973	0,9794	1,0183	Kurang Efisien
6	Indeks Pengelolaan Aset Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	435.776.000	0,9947	1,1667	0,8526	Efisien
7	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	119.340.000	0,9920	1,0424	0,9517	Kurang Efisien

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (%RA)	Realisasi Kinerja (%CRO)	E= %RA / %CRO	Kategori
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	1.992.015.000	0,9981	1,0175	0,9810	Efisien
9	Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	43.020.000	0,9998	0,9425	1,0608	Kurang Efisien
10	Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	1.329.540.000	0,9875	1,2346	0,7999	Efisien
11	Persentase Temuan LHP BPK	119.340.000	0,9920	1,1549	0,8590	Efisien
12	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	108.935.000	0,9940	1,0000	0,9940	Efisien

B. Efisiensi Sumber Daya Manusia Aparatur *[Analysis on human resource use efficiency]*

Berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur/pegawai di Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2025 dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

1. Sebaran pegawai masih belum merata, masih terdapat unit kerja yang kekurangan pegawai dan unit kerja lain yang terlalu banyak pegawai. Hal ini mengakibatkan timpangnya beban kerja yang dialami oleh pegawai. Untuk itu diperlukan penyebaran pegawai secara merata yang disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing unit kerja;
2. Diperlukan pembinaan dan pengembangan pegawai secara berkelanjutan sesuai tugas fungsi dan kemampuan masing-masing pegawai;
3. Banyak pegawai yang telah melakukan uji kompetensi dan lulus pengangkatan pegawai fungsional namun untuk *plotting*/penempatan pejabat fungsional masih diperlukan kajian ulang dengan lebih memperhatikan kondisi sebenarnya pada masing-masing UKE II;
4. Diperlukannya evaluasi berkala atas kompetensi masing-masing pegawai agar bisa melaksanakan tugas fungsi bagiannya secara maksimal;
5. Diperlukan adanya *reward and punishment* sehingga SDM menjadi lebih serius dan peduli dengan tugas fungsinya di organisasi.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Program Prioritas Nasional *[Analysis on operations of programs]*

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan Program Prioritas Nasional merupakan bagian penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja kementerian. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan arah kebijakan nasional serta berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian target prioritas yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi. Hasil analisis menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan, penguatan sinergi lintas program, serta peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya agar dukungan terhadap Program Prioritas Nasional dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kontribusi Program dan Kegiatan Pembudayaan Olahraga terhadap Program Prioritas Nasional

Berbagai program dan kegiatan pembudayaan olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2025 dirancang untuk secara langsung menunjang keberhasilan Program Prioritas Nasional, khususnya dalam peningkatan partisipasi olahraga dan kebugaran masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi Festival Olahraga Disabilitas, Festival Olahraga Lansia, Festival Olahraga Warga Binaan, Festival Bulutangkis dan Sepak Bola Usia Sekolah (U-12 dan U-15), Festival Olahraga Pendidikan, Festival Olahraga Usia Dini, Kejuaraan Olahraga Antar Kampung (TARKAM), Festival Olahraga Tradisional Nasional (FORTRADNAS), Senam Kebugaran, Merdeka Run, serta Fun Walk. Ragam kegiatan ini menjangkau sasaran yang luas dan beragam, mulai dari anak usia dini hingga lansia, termasuk kelompok layanan khusus, sehingga mendukung pemerataan akses dan keberlanjutan pembudayaan olahraga di masyarakat.

Secara analitis, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan pendekatan pembangunan olahraga yang komprehensif dan berjenjang. Festival olahraga untuk disabilitas, lansia, dan warga binaan berperan penting dalam memastikan kelompok layanan khusus tetap memperoleh ruang partisipasi olahraga yang terstruktur dan aman, sekaligus mendukung prinsip keadilan dan pemerataan layanan. Festival olahraga usia dini, olahraga pendidikan, serta kejuaraan bulutangkis dan sepak bola usia sekolah berkontribusi dalam pembentukan kebiasaan hidup aktif sejak dini dan penguatan fondasi kebugaran pelajar. Sementara itu, TARKAM, FORTRADNAS, Senam Kebugaran, Merdeka Run, dan Fun Walk berfungsi sebagai penggerak partisipasi olahraga masyarakat secara masif melalui pendekatan berbasis komunitas, budaya, dan gaya hidup aktif.

Hubungan antar kegiatan tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Program Prioritas Nasional tidak hanya dilakukan melalui satu jenis intervensi, tetapi melalui kombinasi program yang saling melengkapi antara pembinaan, partisipasi, dan rekreasi olahraga. Pendekatan ini memperkuat capaian *output* dan *outcome* pembudayaan olahraga, sekaligus menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kebugaran masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan berbagai festival dan kegiatan olahraga tersebut dapat

dinilai efektif dalam mendukung keberhasilan Program Prioritas Nasional serta menjadi dasar penguatan perencanaan dan kebijakan pembudayaan olahraga pada periode selanjutnya.

6. *Success Story*

A. Transformasi Tata Kelola Kinerja: Peralihan Pendekatan dari Konvensional Menuju Pembuatan Keputusan Berbasis Data

Transformasi tata kelola kinerja merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan kompleksitas pembangunan, pengambilan keputusan yang sebelumnya bertumpu pada pendekatan konvensional perlu diarahkan pada pola yang lebih objektif dan terukur. Penerapan *data-based decision making* menjadi landasan penting dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja didukung oleh data yang valid sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penguatan tata kelola kinerja berbasis data dilaksanakan melalui pengukuran indikator strategis bidang pembudayaan olahraga, meliputi Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), Tingkat Kebugaran Pelajar Nasional (TKPN), serta pengukuran kebugaran olahraga layanan khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, dan warga binaan. Pada tahun 2025, pengukuran kebugaran layanan khusus dilaksanakan sebagai inisiatif baru yang terintegrasi dengan kegiatan festival olahraga Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus, sebagai bentuk optimalisasi sumber daya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pelaksanaan ini menghasilkan data awal kebugaran kelompok layanan khusus yang sebelumnya belum tersedia dan menjadi praktik baik dalam penerapan pengambilan keputusan berbasis data.



Pengukuran Kebugaran Olahraga Layanan Khusus sebagai Dasar Kebijakan Berbasis Data

Sebagai bentuk inovasi pada tahun 2025, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus (Asdep OLK) untuk pertama kalinya melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani bagi peserta olahraga layanan khusus yang terintegrasi dalam pelaksanaan Festival. Kegiatan ini dilaksanakan secara sampling sebagai upaya pemetaan awal kondisi kebugaran peserta yang sebelumnya belum terdokumentasi secara sistematis, sekaligus sebagai langkah awal penerapan pengambilan keputusan berbasis data dalam penyelenggaraan olahraga layanan khusus.

Pelaksanaan tes kebugaran bagi penyandang disabilitas tetap menggunakan *Rockport Walking Test*, yaitu uji kebugaran kardiorespirasi berbasis aktivitas berjalan sejauh 1 mil ($\pm 1,6$ km) di lintasan datar dengan kecepatan maksimal tanpa berlari. Selama pelaksanaan tes, waktu tempuh dicatat dan denyut nadi peserta diukur segera setelah selesai untuk memperkirakan kapasitas aerobik. Tes ini relatif aman, mudah diterapkan, serta sesuai bagi peserta dengan kondisi fungsional tertentu dengan pendampingan petugas yang kompeten.

Pengukuran kebugaran bagi lansia dilakukan menggunakan rangkaian *Senior Fitness Test*, yang secara khusus mencakup beberapa item, yaitu *Chair Stand Test* untuk menilai kekuatan otot tungkai bawah, *Chair Sit and Reach* untuk mengukur fleksibilitas tubuh bagian bawah, serta *8 Foot Up and Go Test* untuk menilai kelincahan dan keseimbangan dinamis. Setiap item dilakukan dalam durasi atau jarak tertentu sesuai pedoman pelaksanaan, seperti jumlah repetisi dalam 30 detik atau waktu tercepat untuk menyelesaikan lintasan, sehingga memberikan gambaran fungsional mengenai kemampuan fisik lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pengukuran kebugaran bagi anak jalanan difokuskan pada pengukuran komponen utama kebugaran jasmani, yaitu fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan otot, koordinasi gerak, serta daya tahan kardiorespirasi. Instrumen yang digunakan meliputi *V Sit and Reach* untuk menilai fleksibilitas, *Sit Up 60 Detik* untuk mengukur daya tahan otot perut, *Squat Thrust 30 Detik* untuk menilai kekuatan dan koordinasi gerak, serta *PACER Test* untuk mengukur kapasitas kardiorespirasi melalui aktivitas lari bolak-balik bertahap. Rangkaian tes ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fisik peserta dan menjadi dasar dalam penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran.

Adapun pengukuran kebugaran bagi warga binaan dilaksanakan menggunakan kombinasi beberapa instrumen, yaitu *3 Minutes Step Test* untuk menilai daya tahan jantung dan paru melalui aktivitas naik-turun bangku selama tiga menit, *30 Second Sit to Stand* untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot tungkai, *1 Minute Crunch Test* untuk menilai daya tahan otot perut, serta *Bent Knee Push Up* untuk mengukur kekuatan otot lengan dan

bahu. Pelaksanaan beberapa item tes tersebut memungkinkan diperolehnya gambaran komprehensif mengenai kondisi kebugaran fisik warga binaan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keterbatasan sarana di lingkungan pemasyarakatan.

Gambaran Hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani Peserta Layanan Khusus

Berdasarkan data *Chair Stand Test*, dari total 191 peserta lansia, sebanyak 129 peserta berada pada kategori di atas rata-rata, 49 peserta pada kategori rata-rata, dan hanya 13 peserta berada di bawah rata-rata. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki kemampuan kekuatan dan daya tahan otot tungkai bawah yang relatif baik. Dominasi kategori di atas rata-rata mengindikasikan bahwa mayoritas lansia masih mampu melakukan gerakan fungsional seperti berdiri dari posisi duduk secara mandiri.

Hasil *Chair Sit and Reach Test* menunjukkan distribusi yang sangat dominan pada kategori di atas rata-rata, yaitu sebanyak 163 peserta, sementara 26 peserta berada pada kategori rata-rata dan hanya 2 peserta di bawah rata-rata. Pola ini menggambarkan bahwa fleksibilitas tubuh bagian bawah pada sebagian besar peserta lansia berada dalam kondisi yang baik. Tingginya jumlah peserta pada kategori di atas rata-rata menunjukkan bahwa keterbatasan fleksibilitas bukan menjadi permasalahan utama dalam kelompok ini. Meski demikian, tetap terdapat sebagian kecil peserta dengan fleksibilitas yang lebih rendah, yang berpotensi mengalami keterbatasan rentang gerak dalam aktivitas sehari-hari.

Pada tes *8 Foot Up and Go*, sebanyak 120 peserta berada pada kategori di atas rata-rata, 17 peserta pada kategori rata-rata, dan 54 peserta pada kategori di bawah rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas peserta memiliki kemampuan mobilitas dan keseimbangan yang cukup baik, masih terdapat proporsi peserta yang cukup besar pada kategori di bawah rata-rata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek kelincahan dan kecepatan bergerak menjadi salah satu tantangan bagi sebagian lansia. Perbedaan hasil ini mencerminkan variasi kemampuan mobilitas fungsional antar peserta, yang penting diperhatikan terutama dalam konteks pencegahan risiko jatuh.

Hasil *V Sit and Reach* menunjukkan sebaran kemampuan fleksibilitas yang cukup bervariasi pada peserta Festival Olahraga Anak Jalanan. Sebanyak 3 peserta berada pada kategori baik sekali dan 6 peserta pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa sebagian peserta telah memiliki fleksibilitas tubuh bagian bawah yang memadai. Namun demikian, masih terdapat 5 peserta pada kategori cukup, serta 10 peserta berada pada kategori rendah dan sangat rendah, yang mengindikasikan adanya keterbatasan rentang gerak pada sebagian peserta. Distribusi ini menggambarkan bahwa fleksibilitas belum merata di seluruh kelompok peserta dan menjadi salah satu komponen kebugaran yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aktivitas fisik yang aman dan bertahap.

Hasil tes *Sit Up* 60 detik memperlihatkan kecenderungan capaian yang relatif rendah pada sebagian besar peserta. Dari keseluruhan peserta, 16 peserta berada pada kategori rendah dan 4 peserta pada kategori sangat rendah, sementara hanya 4 peserta yang mencapai kategori cukup hingga baik, dan tidak terdapat peserta pada kategori baik sekali. Pola ini menunjukkan bahwa daya tahan otot perut pada kelompok anak jalanan dalam kegiatan ini masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa komponen kekuatan dan daya tahan otot inti merupakan aspek kebugaran yang relatif lemah dan berpotensi mempengaruhi performa gerak serta stabilitas tubuh dalam aktivitas fisik.

Pada tes *Squat Thrust* 30 detik, hasil yang diperoleh menunjukkan distribusi yang lebih positif dibandingkan tes kebugaran lainnya. Sebanyak 3 peserta berada pada kategori baik sekali, 10 peserta pada kategori baik, dan 11 peserta pada kategori cukup, tanpa adanya peserta yang berada pada kategori rendah maupun sangat rendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta memiliki kemampuan daya tahan otot dan koordinasi gerak yang cukup hingga baik, terutama pada aktivitas yang bersifat dinamis dan melibatkan gerakan seluruh tubuh. Temuan ini menunjukkan bahwa jenis aktivitas fisik yang menuntut gerak cepat dan berulang relatif dapat dilakukan dengan baik oleh mayoritas peserta.

Hasil *Pacer Test* menunjukkan bahwa daya tahan kardiorespirasi menjadi komponen kebugaran dengan capaian terendah pada sebagian besar peserta. Sebanyak 14 peserta berada pada kategori sangat rendah dan 7 peserta pada kategori rendah, sementara hanya 3 peserta yang mencapai kategori cukup hingga baik sekali. Distribusi ini menunjukkan bahwa kemampuan daya tahan jantung dan paru-paru pada mayoritas peserta masih terbatas. Kondisi ini menggambarkan bahwa aktivitas fisik yang menuntut ketahanan aerobik berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok peserta dan merupakan aspek kebugaran yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam program aktivitas lanjutan.

Secara umum, hasil pengukuran kebugaran menunjukkan bahwa tingkat kebugaran lansia berada pada kondisi relatif baik pada aspek kekuatan otot tungkai dan fleksibilitas tubuh bagian bawah. Dominasi kategori di atas rata-rata pada Chair Stand Test dan Chair Sit and Reach Test mengindikasikan bahwa sebagian besar lansia masih memiliki kemampuan fungsional yang memadai dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun demikian, hasil 8 Foot Up and Go Test menunjukkan masih terdapat proporsi peserta dengan kemampuan mobilitas dan keseimbangan yang rendah, sehingga aspek kelincahan dan pencegahan risiko jatuh perlu menjadi perhatian dalam perancangan program aktivitas fisik lanjutan bagi lansia.

Pada kelompok anak jalanan, tingkat kebugaran menunjukkan variasi antar komponen, dengan kecenderungan capaian yang masih rendah pada fleksibilitas, kekuatan otot inti, dan daya tahan kardiorespirasi, sebagaimana tercermin pada hasil V Sit and Reach, Sit Up

60 detik, dan Pacer Test. Sebaliknya, capaian yang relatif lebih baik terlihat pada Squat Thrust 30 detik, yang menunjukkan bahwa sebagian peserta memiliki kemampuan koordinasi gerak dan daya tahan otot yang cukup baik pada aktivitas dinamis. Secara keseluruhan, hasil pengukuran ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi kebugaran kelompok layanan khusus dan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan program pembinaan olahraga yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berbasis data.

B. TARKAM 2025: Praktik Baik Peningkatan Partisipasi Olahraga Masyarakat

Kejuaraan Olahraga Antar Kampung (TARKAM) Tahun 2025 merupakan salah satu praktik baik dalam upaya meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang berbasis komunitas dan dilaksanakan langsung di tingkat daerah, TARKAM menjadi ruang partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dari berbagai latar belakang usia dan kemampuan. Pelaksanaan TARKAM tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembudayaan olahraga yang memperkuat kebiasaan hidup aktif serta memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga.

Pada tahun 2025, pelaksanaan TARKAM dirancang untuk selaras dengan arah kebijakan pembudayaan olahraga nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan partisipasi dan kebugaran masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara adaptif dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, sehingga mampu meningkatkan antusiasme masyarakat serta memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan olahraga di daerah. Praktik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berbasis komunitas yang sederhana, terbuka, dan terjangkau dapat memberikan dampak nyata dalam mendorong partisipasi olahraga masyarakat serta menjadi pondasi penting bagi penguatan pembangunan olahraga ke depan.



Hasil Pelaksanaan TARKAM 2025

Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Antar Kampung (TARKAM) Tahun 2025 menunjukkan capaian partisipasi masyarakat yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target awal sebanyak 3.300 peserta, realisasi peserta mencapai 14.286 orang yang tersebar di 14 titik pelaksanaan pada wilayah Jawa dan Kalimantan. Tingginya animo masyarakat tercermin dari capaian peserta di beberapa daerah, dengan jumlah peserta tertinggi tercatat di Kabupaten Malinau sebanyak 1.982 orang, diikuti oleh Kota Madiun sebanyak 1.759 orang. Capaian ini menunjukkan bahwa TARKAM menjadi wadah yang efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga.

Selain itu, pada pelaksanaan Kejuaraan TARKAM Wilayah Timur yang diselenggarakan di 12 titik, jumlah peserta mencapai 9.407 orang dari target awal sebanyak 2.400 orang. Kabupaten Lombok Timur mencatat jumlah peserta tertinggi dengan 1.369 orang. Capaian partisipasi yang jauh melampaui target tersebut mencerminkan tingginya minat dan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga berbasis komunitas, sekaligus menunjukkan efektivitas TARKAM sebagai praktik baik dalam meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat di berbagai wilayah.

C. Penguatan Kebijakan Olahraga Pendidikan melalui TKPN

Pelaksanaan Tingkat Kebugaran Pelajar Nasional (TKPN) Olahraga Pendidikan merupakan salah satu praktik baik dalam penguatan kebijakan pembudayaan olahraga di lingkungan pendidikan. Melalui pengukuran kebugaran pelajar yang dilaksanakan secara terstandar dan berkelanjutan, TKPN menjadi instrumen strategis dalam menyediakan data empiris mengenai kondisi kebugaran peserta didik. Data tersebut dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi efektivitas program olahraga pendidikan serta perumusan kebijakan dan pembinaan kebugaran pelajar yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.



Capaian Pengukuran Tingkat Kebugaran Pelajar Nasional (TKPN)

Kegiatan dimulai dengan pengukuran antropometri (tinggi badan dan berat badan), kemudian dilanjutkan tes kekuatan, kelentukan dan daya tahan. Selain itu, siswa juga mengisi kuesioner tentang literasi fisik. Pengambilan sampel dilakukan di 10 kabupaten/kota di Indonesia dengan total responden sebanyak 1.144 siswa. Dari jumlah sampel tersebut, didapatkan hasil penghitungan bahwa 9,18% siswa bugar. Angka tersebut didapatkan dari jumlah siswa dengan kategori "baik" dan "sangat baik" dibandingkan dengan keseluruhan siswa sampel dikali 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025 disusun sebagai wujud nyata komitmen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya kepada publik dan untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran dan tujuan. Secara umum, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga telah berupaya dengan sungguh – sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan segala sumber daya yang ada. Sasaran strategis beserta masing-masing indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen penuh dan dukungan segenap staf dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan di tahun 2025.

B. Kendala dan Saran

Pada tahun 2025 terdapat 5 indikator kinerja yang tidak mencapai target. Perincian atas indikator yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

- Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir,
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP,
- Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran,
- Nilai Kinerja Anggaran, serta
- Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Dari perincian di atas, untuk meningkatkan kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga kiranya perlu ditempuh berbagai upaya strategis sebagai berikut:

- Melakukan review dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja, program, dan kegiatan, disertai perbaikan serta inovasi pelaksanaan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja, khususnya pada indikator yang belum tercapai, serta mendorong transisi dari pendekatan berbasis output menuju kinerja berbasis *outcome*.
- Merancang dan membangun sistem pengumpulan, pengolahan, dan pengukuran data kinerja yang terintegrasi, dilengkapi dengan pedoman dan manual teknis, guna menghasilkan informasi kinerja yang andal, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan pengambilan keputusan.
- Mengakomodasi rencana aksi yang tercantum dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) ke dalam Rincian Output (RO) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja

K/L) agar terdapat kesinambungan antara kebijakan strategis jangka panjang dan pelaksanaan program tahunan.

- Menyusun dan mengimplementasikan rumusan kebijakan yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program hingga tingkat daerah, termasuk melalui penguatan advokasi, koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah daerah.
- Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja melalui penyelarasan indikator kinerja, target, serta alokasi anggaran agar lebih berorientasi pada hasil dan dampak.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja, penganggaran, dan administrasi pendukung (termasuk kearsipan) guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja.
- Mengoptimalkan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan program pembudayaan olahraga.

Semoga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

• Perjanjian Kinerja Tahun 2025



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.
Jabatan : Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.
Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Pihak Pertama,

Dr. Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga	1.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir	36,71%
		1.2 Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat	0,23
		1.3 Persentase Provinsi yang Menyelenggarakan Kampanye Olahraga	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan professional	2.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	76,5
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	83,5
		2.3 Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	3
		2.4 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80
		2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	89.2
		2.6 Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	76.5
		2.7 Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	81%
		2.8 Persentase Temuan LHP BPK	82%
		2.9 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75%

Program

1. Pengembangan Olahraga Layanan Khusus
2. Pengembangan Olahraga Pendidikan
3. Pengembangan Olahraga Masyarakat

Anggaran

Rp 13.000.000.000
Rp 27.000.000.000
Rp 30.000.000.000

1. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	Rp 5.300.000.000
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp 4.700.000.000
Jumlah	Rp 80.000.000.000

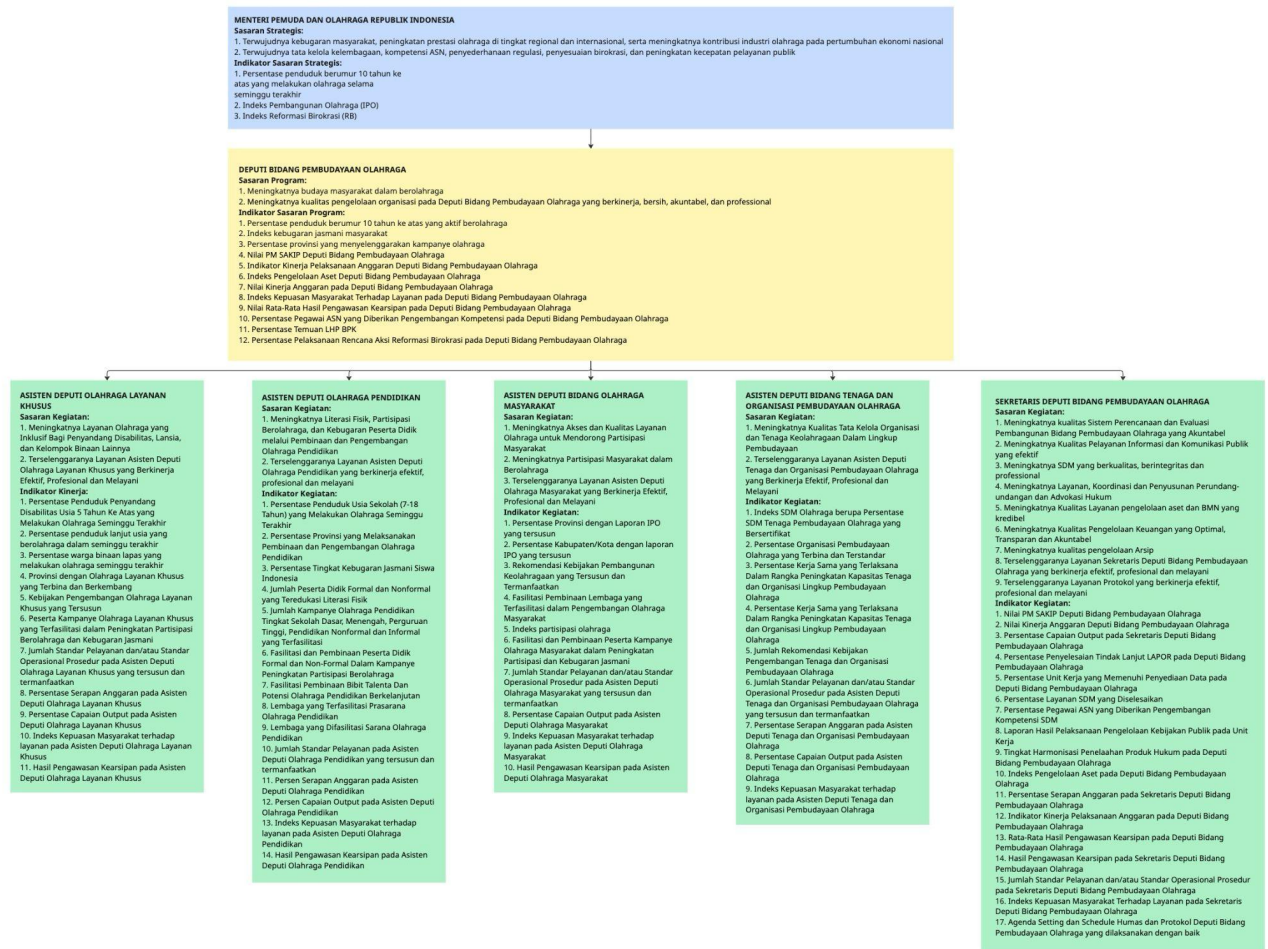
**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,**


Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

**Jakarta, Juli 2025
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,**


Dr. Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.

● **Pohon Kinerja Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga**



● **Rencana Aksi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025**

Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
Desember - 2025

Nilai Kinerja Organisasi Periode Desember : 104,10

Nilai Kinerja Organisasi s/d Periode Desember : 104,10

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target Desember	Capaian Desember	%	Target 2025	Capaian s/d Desember	%	Penjelasan Capaian dan Rekomendasi	Kendala/Hambatan
1	Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga	IKSP.01.01 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase (%)	Maximize	36,71	33,40	90,98	36,71	33,40	90,98		
2	Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga	IKSP.01.02 Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat	Indeks	Maximize	23,00	34,70	120,00	23,00	34,70	120,00		
3	Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga	IKSP.01.03 Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	Persentase (%)	Maximize	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

1/29/26, 12:51 PM

Laporan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target Desember	Capaian Desember	%	Target 2025	Capaian s/d Desember	%	Penjelasan Capaian dan Rekomendasi	Kendala/Hambatan
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, dan Profesional	IKSP.02.01 - Nilai PM SAKIP Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai	Maximize	73,50	73,16	99,54	73,50	73,16	99,54	Perlu mengukur capaian kinerja lebih relevan, contohnya terdapat perbedaan indikator kinerja antara IKU dengan Renstra Deputy terkait indikator "Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir" pada IKU sedangkan pada renstra Deputy adalah "persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga"	Terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai, seperti tingkat partisipasi berolahraga dan tingkat kebugaran
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, dan Profesional	IKSP.02.02 - Indikator Kualitas Pengguna Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai	Maximize	85,00	81,78	96,21	85,00	81,78	96,21		
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel,	IKSP.02.03 - Indeks Pengelolaan Aset pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Indeks	Maximize	3,00	3,50	116,67	3,00	3,50	116,67	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada suatu kementerian/lembaga atau satuan kerja.	Untuk mencapai nilai IPA yang maksimal, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga harus berkomitmen tinggi untuk tertib administrasi BMN, mengukur kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan aset, mendorong akuntabilitas dan

https://ekinerja.kemempora.go.id/home/clk/68/12/2025

2/4

1/29/26, 12:51 PM

Laporan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target Desember	Capaian Desember	%	Target 2025	Capaian s/d Desember	%	Penjelasan Capaian dan Rekomendasi	Kendala/Hambatan
	dan Profesional											kualitas laporan keuangan, menjadi komponen penilaian kinerja pengelolaan keuangan negara
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, dan Profesional	IKSP.02.04 - Nilai Kinerja Anggaran pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai	Maximize	80,00	83,39	104,24	80,00	83,39	104,24	NKA terdiri dari NK Perencanaan Anggaran sebesar 85 dan NK Pelaksanaan Anggaran sebesar 81,78	Adanya SOTK baru menyebabkan pelaksanaan baru berjalan aktif di bulan Juli dan revisi kegiatan
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, dan Profesional	IKSP.02.05 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai	Maximize	89,20	90,09	101,00	89,20	90,09	101,00		
9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel,	IKSP.02.06 - Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai	Maximize	76,50	72,10	94,25	76,50	72,10	94,25		

https://ekinerja.kemempora.go.id/home/clk/68/12/2025

3/4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target Desember	Capaian Desember	%	Target 2025	Capaian s/d Desember	%	Penjelasan Capaian dan Rekomendasi	Kendala/Hambatan
	dan Profesional											
10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, dan Profesional	IKSP.02.07 - Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Persentase (%)	Maximize	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00	Pengembangan kompetensi pegawai pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah diberikan pada 107 Pegawai	Pengembangan kompetensi tahun 2025 a.i., Pelatihan pembangunan karakter, Pelatihan Public Speaking, dan Pelatihan Mitigasi Resiko
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, dan Profesional	IKSP.02.8 - Persentase Temuan LHP BPK	Persentase (%)	Maximize	82,00	94,10	114,76	82,00	94,10	114,76	Tindak Lanjut terhadap temuan BPK pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga berkomitmen tinggi untuk menjalankan rekomendasi BPK
12	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, dan Profesional	IKSP.02.9 - Persentase Pelaksanaan Rencana Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Persentase (%)	Maximize	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00		

• Indikator Penilaian Kinerja Anggaran Tahun 2025

Triwulan I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Triwulan II



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	51.43	51.11	0.00	0.00	28.59	97.84	55.26	80%	0.00	69.07
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.71	10.22	0.00	0.00	2.86	24.46				
					Nilai Aspek	75.72		39.85				97.84				

Triwulan III



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	51.21	50.90	100.00	100.00	50.82	86.87	74.66	100%	0.00	74.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.68	10.18	10.00	10.00	5.08	21.72				
					Nilai Aspek	75.61		75.43				86.87				

Triwulan IV



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	53.80	63.18	100.00	100.00	60.71	100.00	81.78	100%	0.00	81.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.07	12.64	10.00	10.00	6.07	25.00				
					Nilai Aspek	76.90		80.97				100.00				

● Penilaian ANRI Tahun 2025



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampara Raya Nomor 7, Jakarta 12560, Telepon (021) 7805851
<http://www.anri.go.id>, Email: info@anri.go.id, Faksimile (021) 7810280, 7805812

BERITA ACARA

VERIFIKASI NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL

NOMOR AK.01.00/244/2025

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Pengawas Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan yang terdiri atas:

1. Nia Pertiwi, (198411192008012001 selaku Arsiparis Ahli Madya)
2. Endah Rahayu Wijayanti, (198902182014032003 selaku Analis Kebijakan Muda)
3. Elis Ariskasari Antonio, (199403302019022003 selaku Arsiparis Ahli Pertama), selanjutnya disebut Pihak Pertama,

dan

Tim Pengawas Kearsipan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang terdiri atas:

4. M. Arif Tri Prasetyo, S.AP, 198305152009121002, selaku Arsiparis Ahli Pertama
5. Yeni Wijaya, S.Pd, M.M, 198006302008122001, selaku Arsiparis Ahli Muda
6. Muhammad Lathif, A.Md.M.I.D, 199307112019021001, selaku Arsiparis Terampil
7. Rydha Sobikhatul Fajriyah, S.S.T.Ars., 200003312024212004, selaku Arsiparis Ahli Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut sebagai Para Pihak telah melaksanakan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dilaksanakan dalam bentuk audit kearsipan internal.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Jumlah objek pengawasan yang dilaksanakan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebanyak 14 dari 27 unit pengolah dikarenakan 13 unit pengolah lainnya merupakan fungsi baru. Verifikasi nilai dilaksanakan terhadap lima unit pengolah setingkat Eselon II.
3. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal objek pengawasan baik yang terverifikasi oleh Pihak Pertama maupun tidak diverifikasi oleh Pihak Pertama, tetapi telah disepakati nilainya oleh Para Pihak merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.
4. Nilai pengawasan kearsipan internal sebagaimana terlampir harus ditetapkan oleh pejabat berwenang di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan dicantumkan dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) pada masing-masing objek pengawasan.
5. Selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyampaikan LAKI Konsolidasi ke ANRI.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil verifikasi antara Para Pihak.

Dibuat di Jakarta

Menyetujui
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

1. M. Arif Tri Prasetyo (.....)
2. Yeni Wijaya, S.Pd ,
M.M, (.....)
3. Muhammad Lathif,
A.Md.M.I.D (.....)
4. Rydha Sobikhatul
Fajriyah, S.S.T.Ars (.....)

1. Nia Pertiwi (.....)
2. Endah Rahayu
W. (.....)
3. Elis Arisksari
A. (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA

NOMOR : AK.01.00/244/2025

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025

NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
TERVERIFIKASI TAHUN 2025

NO.	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI HASIL VERIFIKASI
1.	Inspektorat	87.90	78.51
2.	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	80.71	67.13
3.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	77.34	81.56
4.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	86.26	54.02
5.	Biro Hukum dan Kerjasama	73.15	76.69
6.	Biro Keuangan dan Umum	85.80	85.80
7.	Sekretariat Bidang Pembudayaan Olahraga	81.21	81.21
8.	Asisten Deputi Olahraga Pendidikan	67.48	67.48
9.	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	70.30	70.30
10.	Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	69.43	52.97
11.	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	83.43	86.71

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI HASIL VERIFIKASI
12.	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	62.85	62.85
13.	Asisten Deputi Olahragawan Elit	41.60	50.10
14.	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	18.50	27.75

Menyetujui
Pihak Kedua,

1. M. Arif Tri Prasetyo (.....)
2. Yeni Wijaya, S.Pd , M.M, (.....)
3. Muhammad Lathif, A.Md.M.I.D (.....)
4. Rydha Sobikhatul Fajriyah, S.S.T.Ars (.....)

Pihak Pertama,

1. Nia Pertiwi (.....)
2. Endah Rahayu W. (.....)
3. Elis Arisksari A. (.....)



KEMENPORA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA

